



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

023.05.0100.666870

KANTOR PUSAT - DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2017, target yang harus dicapai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam Rencana Strategis sebanyak 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Empat belas indikator tersebut meliputi:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja sebanyak 90.000 orang;
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha sebanyak 50.000 orang;
3. Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 20 lembaga;
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan sebanyak 37 jenis;
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan sebanyak 900 lembaga;
6. Jumlah Jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional sebanyak 5 jenis;
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina sebanyak 350 lembaga;
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi sebanyak 140.000 orang;
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 1.022 lembaga;
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi sebanyak 5.194 lembaga;
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap diakreditasi sebanyak 3.000 lembaga;
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi sebanyak 250 orang;
13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI) sebanyak 30.000 orang; dan
14. Dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 2 dokumen.

Berbagai kegiatan telah diprogramkan pada tahun ini untuk mendukung pencapaian target rencana strategis yang telah ditetapkan. Program layanan kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan dalam 2 program, yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebanyak 50.000 orang dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sebanyak 40.000 orang baik di tingkat pusat dan provinsi. Program ini diberikan kepada masyarakat putus sekolah, menganggur, usia produktif, dan keluarga tidak mampu.

Selain itu, berbagai bentuk bantuan lain yang diberikan antara lain: Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan diberikan kepada 91 LKP dan SKB, pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sebanyak 2 lembaga, pembentukan dan pembinaan terhadap tempat Uji Kompetensi sebanyak 65 lembaga, bantuan untuk organisasi mitra/asosiasi profesi sebanyak 20 organisasi, bantuan penyelenggaraan uji kompetensi bagi 45.066 peserta didik, dan bantuan untuk permagangan peserta didik kursus dan pelatihan sebanyak 1.000 peserta didik.

Berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran program perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola pembinaan kursus dan pelatihan diantaranya meliputi perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kurikulum Berbasis KKNI, penyusunan standar sarana dan prasarana, penyusunan standar sertifikasi instruktur kursus dan pelatihan, bahan ajar dalam bentuk media cetak maupun audio-visual, peningkatan mutu manajemen LKP, peningkatan mutu peserta didik berprestasi tingkat nasional, peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, penyusunan bahan-bahan publikasi, penguatan uji kompetensi, fasilitasi Gerakan Indonesia Kompeten, fasilitasi promosi dan layanan kursus dan pelatihan, validasi dan pendayagunaan data Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) terintegrasi dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nonformal Nasional (NPSN), monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.

Hingga akhir Desember 2017, hasil yang telah dicapai berdasarkan IKK yang ditetapkan secara fisik antara lain;

1. IKK [1] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja telah terealisasi sebanyak 50.014 orang peserta (55,57%) dari 90.000 orang peserta yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 50.000 orang peserta, terealisasi sebesar 100,03%;
2. IKK [2] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha telah terealisasi sebanyak 40.035 orang peserta (80,07%) dari 50.000 orang peserta yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 40.000 orang peserta, terealisasi sebesar 100,09%;
3. IKK [3] Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan telah ditetapkan sebanyak 136 lembaga (680%) dari 20 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 91 lembaga, terealisasi sebesar 149,45%. IKK ini awalnya diperuntukkan untuk membuat *centre of excellent* atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka desain dari IKK ini diubah menjadi bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dan SKB dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi dan menyesuaikan dengan tuntutan DUDI.
4. IKK [4] Jumlah standar program kursus dan pelatihan telah disusun sebanyak 37 naskah (100%) dari 37 naskah standar yang ditargetkan dalam renstra. Terdiri dari standar sarana dan prasarana, standar sertifikasi instruktur kursus dan bahan ajar cetak serta audio visual, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 32 naskah, terealisasi sebesar 100%;

5. IKK [5] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan terealisasi sebanyak 759 lembaga dari 900 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 781 lembaga, terealisasi sebesar 97,18%;
6. IKK [6] Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional terealisasi 32 naskah (640%) dari target 5 naskah yang ditetapkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 31 naskah, terealisasi sebesar 103,23%;
7. IKK [7] Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina tahun ini terealisasi sebanyak 67 lembaga, jika ditambah dengan capaian tahun 2016 menjadi sebanyak 225 lembaga (64,29%) dari target 350 lembaga yang ditetapkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan terealisasi 100%;
8. IKK [8] Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi terealisasi 46.236 orang (33,03%) dari 140.000 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 45.066 orang, terealisasi sebesar 102,6%;
9. IKK [9] Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis terealisasi 474 lembaga (46,38%) dari 1.022 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebesar 512 lembaga, terealisasi sebesar 92,58%;
10. IKK [10] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi terealisasi 13.101 lembaga (252,23%) dari 5.194 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebesar 2.000 lembaga, terealisasi sebesar 655,05%.
11. IKK [11] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi, IKK sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PP-PAUD dan DIKMAS serta BP-PAUD dan DIKMAS.
12. IKK [12] Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi terealisasi sebesar 180 orang, jika ditambah dengan capaian tahun 2016 menjadi sebanyak 374 orang (180,78%) dari target 250 orang yang ditetapkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebesar 140 orang terealisasi 128,57%.
13. IKK [13] Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terealisasi sebesar 1.000 orang, jika ditambah dengan capaian tahun 2016 menjadi sebanyak 2.030 orang (6,77%) dari target 30.000 orang yang ditetapkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan terealisasi 100%;
14. IKK [14] Dokumen perencanaan dan evaluasi, telah ditetapkan sebanyak 3 dokumen (150%) dari 2 dokumen yang ditargetkan dalam renstra.

Dari target renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2017 sebanyak 5 IKK melebihi target (IKK [3], [6], [10], [12], dan [14]), 1 IKK memenuhi target, 7 IKK lainnya belum mencapai

target maksimal dengan berbagai kendala diantaranya dukungan anggaran yang masih sangat kurang dan 1 IKK tidak dilaksanakan karena sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi sudah menjadi tugas pokok dan fungsi UPT PP- PAUD dan DIKMAS serta BP-PAUD dan DIKMAS.

Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan antara lain perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, peningkatan mutu manajemen LKP, penyusunan profil lembaga, peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, penyusunan bahan-bahan publikasi, penguatan uji kompetensi, fasilitasi Gerakan Indonesia Kompeten, fasilitasi promosi dan layanan kursus dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2017 dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2017. Capaian kinerja yang disajikan berupa capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ada di empat layanan kegiatan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis.

Capaian pelaksanaan satu sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang realisasinya didukung oleh 14 indikator kinerja, hasil yang dicapai adalah 5 indikator kinerja melebihi target, 1 indikator kinerja memenuhi target, 7 indikator kinerja belum memenuhi target dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan efisiensi dan *selfblocking* anggaran, dan 1 IKK yang sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Selain pencapaian tersebut diatas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyadari masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan serta memerlukan kerja keras dari semua sub direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memberikan kontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan regional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan internasional.

Oleh karena itu, melalui laporan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2015-2019 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selama tahun anggaran 2017 sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk memahami permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di setiap subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelaksanaan Renstra 2015-2019.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2017 ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2018

Direktur,



Dr. Yusuf Muhyiddin

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	1
1. Landasan Filosofis.....	1
2. Tantangan dan Potensi.....	4
B. Dasar Hukum	11
C. Tugas dan Fungsi	12
D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN...	21
A. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	21
B. Target Capaian dan Indikator Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	26
1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja	34
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	38
3. Jumlah Kabupaten/kota yang Memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	44
4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan	49
5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/mitra yang Memperoleh Penguatan Kelembagaan	55
6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	63
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang Dibentuk dan Dibina	66

8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi	67
9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis	69
10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Divalidasi	70
11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap di Akreditasi	72
12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi	72
13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	74
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	75
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	77
16. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	78
17. Kendaraan Operasional Perkantoran	79
B. Realisasi Anggaran	80
BAB IV. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035.....	4
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia di Indonesia	6
Tabel 3. Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	7
Tabel 4. Jumlah LKP Menurut Provinsi	8
Tabel 5. Jumlah LKP Menurut Jenis Keterampilan	9
Tabel 6. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Per Subdit.....	17
Tabel 7. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 8. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 9. Capaian IKK Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2016-2017	28
Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2016-2017	36
Tabel 11. Jumlah Realisasi Program PKK Tahun 2017.....	37
Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2016-2017	41
Tabel 13. Jumlah Realisasi Kuota Program PKW Tahun 2017.....	42
Tabel 14. Capaian IKK 3 Tahun 2016-2017	45
Tabel 15. Penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus dan SKB Tahun 2017	45
Tabel 16. Capaian IKK 4 Tahun 2016-2017.....	50
Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan.....	51
Tabel 18. Daftar Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2017	54
Tabel 19. Daftar Bahan Ajar Cetak Tahun 2017.....	54
Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2016-2017	56

Tabel 21. Pemenang Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017.....	58
Tabel 22. Pemenang Peningkatan Mutu Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2017.....	58
Tabel 23. Capaian IKK 6 Tahun 2016-2017.....	64
Tabel 24. Capaian IKK 7 Tahun 2016-2017.....	66
Tabel 25. Capaian IKK 8 Tahun 2016-2017.....	68
Tabel 26. Capaian IKK 9 Tahun 2016-2017.....	69
Tabel 27. Capaian IKK 10 Tahun 2016-2017.....	71
Tabel 28. Capaian IKK 12 Tahun 2016-2017.....	73
Tabel 29. Capaian IKK 13 Tahun 2016-2017.....	74
Tabel 30. Capaian IKK 14 Tahun 2016-2017.....	76
Tabel 31. Capaian IKK 15 Tahun 2016-2017.....	78
Tabel 32. Capaian IKK 16 Tahun 2016-2017.....	79
Tabel 33. Pembagian Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2017.....	80
Tabel 34. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017.....	81
Tabel 35. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja.....	82
Tabel 36. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK dan Output.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tahun 2015/2016.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	16
Gambar 3. Pembelajaran Program PKK Bidang Tata Boga, Tata Kecantikan Kulit dan Spa.....	34
Gambar 4. Pembelajaran Program PKW Bidang Spa dan Tata Boga (Patry and Bakery).....	39
Gambar 5. Pemanfaatan Bantuan Sarana Praktik Kursus Bidang Otomotif dan Airbrush serta Tata Kecantikan untuk Proses Pembelajaran.....	48
Gambar 6. Finalisasi Standar Sarana dan Prasarana bersama praktisi terkait.....	51
Gambar 7. Pemberian Penghargaan Pemenang Peningkatan Mutu LKP Berprestasi dan Kompetensi Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional Tahun 2017 oleh Mendikbud RI.....	57
Gambar 8. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Diikuti Mitra-Mitra Kursus dan Pelatihan....	61
Gambar 9. Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Bidang Tata Boga dan Tata Rias Pengantin.....	61

Gambar 10. Presentasi Nominasi Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional.....	62
Gambar 11. Review Standar Kompetensi Lulusan Melibatkan Pakar Praktisi dan Akademisi Terkait.....	65
Gambar 12. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Tata Kecantikan Kulit	68
Gambar 13. Pameran Kursus dan Pelatihan dalam rangka Gerakan Indonesia Kompeten	70
Gambar 14. Orientasi Teknis Pemagangan Peserta Didik Kursus dan Pelatihan.....	74



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Realisasi Program PKK/PKH Tahun 2013-2017	36
Grafik 2. Jumlah Realisasi Program PKW/PKM Tahun 2013-2017	42
Grafik 3. Jumlah Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2010-2017	54
Grafik 4. Jumlah Bahan Ajar Cetak Tahun 2006-2017	55
Grafik 5. Jumlah LKP Mendapat Penguatan Manajemen dan Pembelajaran Tahun 2012-2017.....	56
Grafik 6. Persentase Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2017.....	80
Grafik 7. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	89
Perjanjian Kinerja Kasubdit Program dan Evaluasi	90
Perjanjian Kinerja Kasubdit Sarana dan Prasarana	93
Perjanjian Kinerja Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan	96

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1. Landasan Filosofis

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui sebuah pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 236 juta (Sensus Penduduk 2010), jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengarahkan Indonesia pada terjadinya “bonus demografi” dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk dengan usia nonproduktif. Untuk itu perlu sebuah upaya pengendalian kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk terciptanya keseimbangan .

Pada hakikatnya kebutuhan untuk mengembangkan potensi, merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya seiring dengan perkembangan zaman. Pendidikan menjadi upaya yang ditempuh setiap orang dalam proses menuju ke arah penghidupan yang lebih baik. Kondisi ini selaras dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*).

Sejalan dengan hal tersebut negara harus mampu menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945, Pembangunan Pendidikan Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa "jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa "pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat". Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan memerlukan layanan pendidikan, sehingga berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan terwujudnya masyarakat belajar. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal dituntut untuk mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

Pada Pasal 26 ayat (2) diungkapkan bahwa "Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional". Artinya, arah pendidikan nonformal tidak dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan akademis peserta didik, melainkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat fungsional dalam kehidupan peserta didik dan membentuk pribadi-pribadi profesional, sehingga menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan atau memulai dan menjalankan usaha mandiri.

Pada Pasal 26 ayat (3) diungkapkan bahwa "Pendidikan Nonformal meliputi **Pendidikan Kecakapan Hidup**, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, **Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja**, Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik". Ayat ini menggambarkan luasnya ruang lingkup pendidikan nonformal. Begitu banyaknya aspek kehidupan yang disentuh oleh lingkup pendidikan nonformal, memungkinkan terwujudnya sebuah masyarakat madani yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang dinamis, jika dikelola dengan sistem manajerial yang baik.

Terkait dengan jenis kelembagaan, di dalam Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa "Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas **Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan,** Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Majelis Taklim, serta **satuan pendidikan yang sejenis**". Sementara terkait dengan sasaran Pendidikan Nonformal diatur pada Pasal 26 ayat (5) yang menyebutkan bahwa "Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi". Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang berbasis masyarakat. Artinya, Lembaga Kursus dan Pelatihan diselenggarakan dan dikembangkan dengan pembiayaan atas dasar kontribusi dari peserta didik dan peran serta masyarakat dalam pendidikan serta *revenue generating activity* (kegiatan menambah pendapatan) yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial (*social responsibility*) lembaga kursus dan pelatihan dalam membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan fungsional serta profesionalitas sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemerintah dalam hal ini perlu menjalankan peran dalam pembiayaan berupa pemberian subsidi baik dalam bentuk beasiswa bagi peserta didik, pengembangan kelembagaan, maupun pengembangan program-program kursus dan kelembagaan. Di samping itu peran pemerintah juga dalam bentuk penetapan regulasi dan melakukan pembinaan kepada para pengelola kursus dan pelatihan, sehingga dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Perkembangan zaman yang dinamis, ditandai dengan adanya perubahan pada setiap lini kehidupan, pertumbuhan perekonomian berjalan seiring sejalan dengan perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Lembaga kursus dan pelatihan, menjadi media efektif yang dapat "menjembatani" antara kondisi social masyarakat terkait kualitas SDM dengan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Artinya, sebuah lembaga kursus dan pelatihan, juga harus bergerak dinamis seiring perkembangan zaman dalam membekali setiap individu agar dapat memiliki kompetensi yang dinilai layak untuk dapat bekerja dan memiliki penghasilan.

Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah memberikan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, untuk memperoleh pengetahuan dan

keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk tujuan lainnya. Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (*substitute*), pelengkap (*complement*), dan/atau penambah (*supplement*), dari pendidikan formal. Secara formal manusia memang harus menyelesaikan proses belajar yang diselenggarakan di sekolah formal atau perguruan tinggi. Namun, karena perkembangan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang cepat maka lembaga kursus dan pelatihan dituntut untuk mampu mengantisipasi hal tersebut.

Pengembangan kursus dan pelatihan pada intinya diorientasikan pada pengembangan *life skills* (kecakapan hidup) dalam makna yang luas. Secara umum, kecakapan hidup diarahkan pada dimensi pengembangan keterampilan vokasional atau keterampilan kerja/pertukangan. Namun, dimensi kecakapan hidup lain juga perlu dilakukan untuk kebaikan tatanan hidup dan kehidupan. Dalam pengembangan keterampilan vokasional mestinya menyiratkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan emosional. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui kursus dan pelatihan secara fungsional menjawab kebutuhan akan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan serta kegiatan kursus bertujuan untuk melahirkan lulusan yang kompeten. Kompetensi merujuk pada sebuah kemampuan melaksanakan suatu tugas di dalam dunia pekerjaan dan/atau industri secara baik dan benar. Pencapaian kompetensi dalam sebuah bidang pekerjaan dan keterampilan menjadi landasan utama dalam filosofi penyelenggaraan proses pembelajaran melalui kursus dan pelatihan. Kerjasama dan penyesuaian (*fine tuning*) antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri menjadi perhatian utama dalam merumuskan strategi pembelajaran dan pelatihan. Dengan demikian akan dapat memberikan dan manfaat khususnya bagi pertumbuhan dunia usaha dan industri serta proses pengembangan masyarakat pada umumnya.

Pengembangan secara personal pada setiap warga masyarakat akan ditempatkan pada upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pengembangan kursus dan pelatihan perlu memperhatikan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan kemandirian masyarakat. Upaya tersebut didorong dengan penyiapan dan pengembangan para pelaku wirausaha yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari potensi lokal yang dimiliki. Dengan demikian,

kegiatan kursus dan pelatihan dapat mendorong pengembangan motivasi dan kegiatan kewirausahaan di masyarakat.

2. Tantangan dan Potensi

a. Tantangan

1) Jumlah penduduk

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat pesat menjadi 238.518.800 jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan sampai tahun 2035 adalah 305.652.400, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk di Indonesia 2010-2035

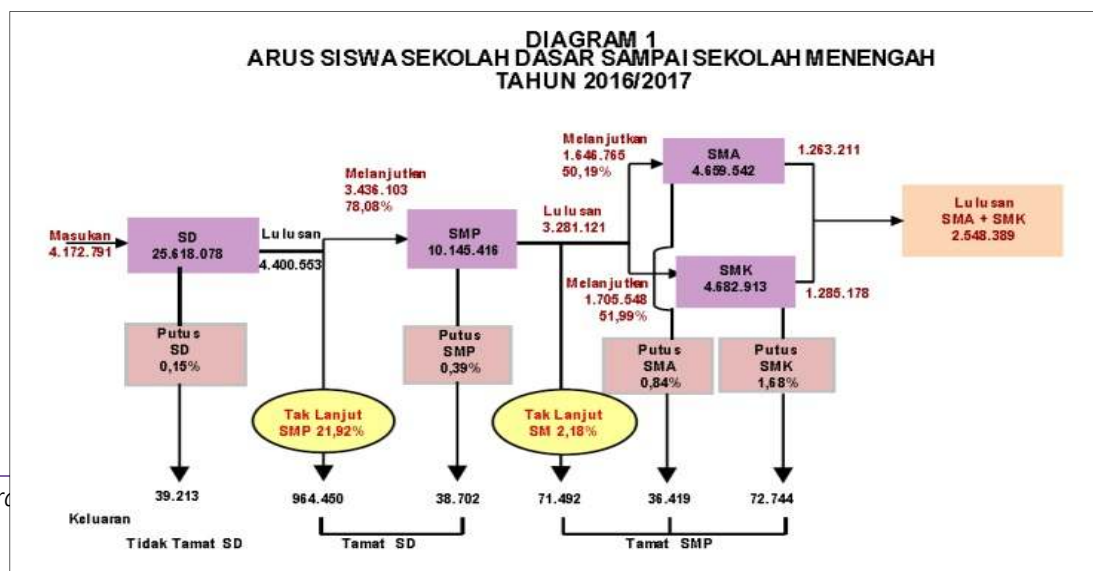
Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4523.10	5002.00	5459.90	5870.00	6227.60	6541.40
Sumatera Utara	13028.70	13937.80	14703.50	15311.20	15763.70	16073.40
Sumatera Barat	4865.30	5196.30	5498.80	5757.80	5968.30	6130.40
Riau	5574.90	6344.40	7128.30	7898.50	8643.30	9363.00
Jambi	3107.60	3402.10	3677.90	3926.60	4142.30	4322.90
Sumatera Selatan	7481.60	8052.30	8567.90	9000.40	9345.20	9610.70
Bengkulu	1722.10	1874.90	2019.80	2150.50	2264.30	2360.60
Lampung	7634.00	8117.30	8521.20	8824.60	9026.20	9136.10
Kepulauan Bangka Belitung	1230.20	1372.80	1517.60	1657.50	1788.90	1911.00
Kepulauan Riau	1692.80	1973.00	2242.20	2501.50	2768.50	3050.50
Pulau Sumatera	50860.30	55272.90	59337.10	62898.60	65938.30	68500.00
DKI Jakarta	9640.40	10177.90	10645.00	11034.00	11310.00	11459.60
Jawa Barat	43227.10	46709.60	49935.70	52785.70	55193.80	57137.30
Banten	10688.60	11955.20	13160.50	14249.00	15201.80	16033.10
Jawa Tengah	32443.90	33774.10	34940.10	35958.60	36751.70	37219.40
DI Yogyakarta	3467.50	3679.20	3882.30	4064.60	4220.20	4348.50
Jawa Timur	37565.80	38847.60	39886.30	40646.10	41077.30	41127.70
Pulau Jawa	137033.30	145143.60	152449.90	158738.00	163754.80	167325.60
Bali	3907.40	4152.80	4380.80	4586.00	4765.40	4912.40
Nusa Tenggara Barat	4516.10	4835.60	5125.60	5375.60	5583.80	5754.20
Nusa Tenggara Timur	4706.20	5120.10	5541.40	5970.80	6402.20	6829.10
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13129.70	14108.50	15047.80	15932.40	16751.40	17495.70
Kalimantan Barat	4411.40	4789.60	5134.80	5432.60	5679.20	5878.10
Kalimantan Tengah	2220.80	2495.00	2769.20	3031.00	3273.60	3494.50
Kalimantan Selatan	3642.60	3989.80	4304.00	4578.30	4814.20	5016.30
Kalimantan Timur	3576.10	4068.60	4561.70	5040.70	5497.00	5929.20
Pulau Kalimantan	13850.90	15343.00	16769.70	18082.60	19264.00	20318.10

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sulawesi Utara	2277.70	2412.10	2528.80	2624.30	2696.10	2743.70
Sulawesi Tengah	2646.00	2876.70	3097.00	3299.50	3480.60	3640.80
Sulawesi Selatan	8060.40	8520.30	8928.00	9265.50	9521.70	9696.00
Sulawesi Tenggara	2243.60	2499.50	2755.60	3003.00	3237.70	3458.10
Gorontalo	1044.80	1133.20	1219.60	1299.70	1370.20	1430.10
Sulawesi Barat	1164.60	1282.20	1405.00	1527.80	1647.20	1763.30
Pulau Sulawesi	17437.10	18724.00	19934.00	21019.80	21953.50	22732.00
Maluku	1541.90	1686.50	1831.90	1972.70	2104.20	2227.80
Maluku Utara	1043.30	1162.30	1278.80	1391.00	1499.40	1603.60
Kep. Maluku	2585.20	2848.80	3110.70	3363.70	3603.60	3831.40
Papua Barat	765.30	871.50	981.80	1092.20	1200.10	1305.00
Papua	2857.00	3149.40	3435.40	3701.70	3939.40	4144.60
Pulau Papua	3622.30	4020.90	4417.20	4793.90	5139.50	5449.60
INDONESIA	238518.80	255461.70	271066.40	284829.00	296405.10	305652.40

Keterangan: angka dalam ribuan (000) jiwa
 Sumber: bps.go.id

2) Angka Putus Sekolah

Menurut data Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, tahun 2016/2017 jumlah siswa putus sekolah maupun lulus tidak melanjutkan angkanya masih cukup tinggi. Berdasarkan arus siswa (kohort), jumlah siswa SD yang putus sekolah sebanyak 39.213 orang (0,15%), lulusan SD yang tidak melanjutkan sebanyak 964.450 orang (21,92%), putus SMP sebanyak 38.702 orang (0,39%), lulusan SMP tidak melanjutkan sebanyak 71.492 orang (2,18%), putus SMA sebanyak 36.419 orang (0,84%), putus SMK sebanyak 72.744 orang (1,68%). Gambaran arus siswa (kohort) sebagai berikut:



- 3)
- 4)
- 5)

Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tahun 2016/2017

6) Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 tercatat sebesar 27.771.220 jiwa dari total penduduk di Indonesia. Persentase penduduk miskin sebesar 11,64 % dari total penduduk Indonesia, dengan rincian sebagai berikut (data dalam ribuan jiwa):

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

No	Propinsi	September 2016	Maret 2017
1	Aceh	841.31	872.61
2	Sumatera Utara	1452.55	1453.87
3	Sumatera Barat	376.51	364.51
4	Riau	501.59	514.62
5	Jambi	290.81	286.55
6	Sumatera Selatan	1096.5	1086.92
7	Bengkulu	325.6	316.98
8	Lampung	1139.78	1131.73
9	Bangka Belitung	71.07	74.09
10	Kepulauan Riau	119.14	125.37
11	DKI Jakarta	385.84	389.69
12	Jawa Barat	4168.11	4168.44
13	Jawa Tengah	4493.75	4450.72
14	DI Yogyakarta	488.83	488.53
15	Jawa Timur	4638.53	4617.01
16	Banten	657.74	675.04
17	Bali	174.94	180.13
18	Nusa Tenggara Barat	786.58	793.78
19	Nusa Tenggara Timur	1150.08	1150.79
20	Kalimantan Barat	390.32	387.43
21	Kalimantan Tengah	137.46	139.16
22	Kalimantan Selatan	184.16	193.92
23	Kalimantan Timur	211.24	220.17
24	Kalimantan Utara ²	47.03	49.47
25	Sulawesi Utara	200.35	198.88
26	Sulawesi Tengah	413.15	417.87
27	Sulawesi Selatan	796.81	813.07
28	Sulawesi Tenggara	327.29	331.71

No	Propinsi	September 2016	Maret 2017
29	Gorontalo	203.69	205.37
30	Sulawesi Barat	146.9	149.76
31	Maluku	331.79	320.51
32	Maluku Utara	76.4	76.47
33	Papua Barat	223.6	228.38
34	Papua	914.87	897.69
	INDONESIA	27764.32	27771.22

Sumber: bps.go.id

7) Angkatan kerja dan penganggur terbuka

Pada bulan Februari 2016, Data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 127.671.869 jiwa, sedangkan penganggur terbuka masih ada 7.024.172 jiwa, dengan rincian per provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja
1	Aceh	181.807	2.234.960
2	Sumatera Utara	427.964	6.593.513
3	Sumatera Barat	149.687	2.577.041
4	Riau	176.948	2.978.238
5	Jambi	79.073	1.696.250
6	Sumatera Selatan	159.525	4.053.706
7	Bengkulu	38.345	999.861
8	Lampung	183.499	4.038.314
9	Bangka Belitung	42.398	687.648
10	Kepulauan Riau	82.466	912.904
11	DKI Jakarta	306.225	5.310.773
12	Jawa Barat	1.899.707	22.176.819
13	Jawa Tengah	752.465	17.914.518
14	DI Yogyakarta	59.001	2.096.865
15	Jawa Timur	849.327	20.497.992
16	Banten	452.058	5.686.332
17	Bali	50.402	2.382.466
18	Nusa Tenggara Barat	87.175	2.382.616
19	Nusa Tenggara Timur	87.699	2.445.323
20	Kalimantan Barat	110.750	2.415.875
21	Kalimantan Tengah	47.239	1.285.916
22	Kalimantan Selatan	74.394	2.052.231
23	Kalimantan Timur	146.244	1.650.377
24	Kalimantan Utara ²	11.228	286.702
25	Sulawesi Utara	92.648	1.184.028
26	Sulawesi Tengah	51.697	1.494.757
27	Sulawesi Selatan	192.969	3.774.926
28	Sulawesi Tenggara	45.819	1.212.040
29	Gorontalo	21.853	563.402

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja
30	Sulawesi Barat	17.421	641.529
31	Maluku	51.164	733.337
32	Maluku Utara	18.210	530.721
33	Papua Barat	25.037	436.729
34	Papua	51.728	1.743.160
Jumlah		7.024.172	127.671.869

Sumber: bps.go.id

b. Potensi

1) Jumlah LKP menurut provinsi

Berdasarkan hasil validasi data tahun 2017 yang sudah terintegrasi dari NILEK ke NPSN dan terdaftar ke dalam DAPODIK, jumlah LKP sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah LKP menurut Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah LKP 18 Juli
1	DKI Jakarta	855
2	Jawa Barat	2,461
3	Jawa Tengah	1,459
4	DI Yogyakarta	198
5	Jawa Timur	3,054
6	Aceh	416
7	Sumatera Utara	1,712
8	Sumatera Barat	364
9	Riau	377
10	Jambi	422
11	Sumatera Selatan	707
12	Lampung	636
13	Kalimantan Barat	286
14	Kalimantan Tengah	165
15	Kalimantan Selatan	345
16	Kalimantan Timur	334
17	Sulawesi Utara	288
18	Sulawesi Tengah	414
19	Sulawesi Selatan	555
20	Sulawesi Tenggara	192
21	Maluku	110
22	Bali	586
23	NTB	558
24	NTT	466
25	Papua	59
26	Bengkulu	324
27	Maluku Utara	141
28	Banten	474
29	Bangka Belitung	146

No.	Provinsi	Jumlah LKP 18 Juli
30	Gorontalo	130
31	Kepulauan Riau	324
32	Papua Barat	33
33	Sulawesi Barat	141
34	Kalimantan Utara	37
Total		18,769

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>, 18 Juli 2017

2) Jumlah LKP menurut Jenis Keterampilan

Tabel 5. Jumlah LKP Menurut Jenis Keterampilan

No	Jenis Kursus	Jumlah
1	Administrasi Perkantoran	129
2	Akuntansi	298
3	Akupunktur	83
4	Anak Buah Kapal	15
5	Asisten Perawat	67
6	Baby Sitter	138
7	Bahasa Belanda	11
8	Bahasa Indonesia	44
9	Bahasa Inggris	4701
10	Bahasa Italia	6
11	Bahasa Jawa	1
12	Bahasa Jepang	247
13	Bahasa Jerman	30
14	Bahasa Korea	132
15	Bahasa Mandarin	251
16	Bahasa Prancis	19
17	Bahasa Rusia	2
18	Bahasa Spanyol	4
19	Bimbingan Belajar	1842
20	Bordir dan Sulam	323
21	Broadcasting / Penyiaran	51
22	Care Giver	42
23	Desain Grafis	172
24	Desain Interior	14
25	Ekspor Impor	19
26	Elektronika	250
27	Garment	34
28	Hantaran	263
29	Jurnalistik	9
30	Kesetaraan	15
31	Komputer	6029
32	Komputer Akuntansi	111
33	Las	107
34	Mengemudi	544

No	Jenis Kursus	Jumlah
35	Menjahit	3262
36	Mental Aritmatika	352
37	Merangkai Bunga	93
38	Meubeler	172
39	Modeling	37
40	Otomotif	599
41	Pariwisata	49
42	Pasar Modal	3
43	Pendidik PAUD	109
44	Penerbang (Pilot)	22
45	Perhotelan	186
46	Perikanan	97
47	Perpajakan	57
48	Pertamanan	16
49	Pertanian	118
50	Peternakan	78
51	Photografi	31
52	Pramugari	32
53	Humas / Public Relations	14
54	Public Speaking / MC	26
55	Refleksi	24
56	Sablon	79
57	Security	9
58	Sekretaris	80
59	Senam	81
60	Seni Drama	14
61	Seni Musik	372
62	Seni Rupa	88
63	Seni Tari	175
64	Spa	211
65	Tata Boga	461
66	Tata Kecantikan Kulit	943
67	Tata Kecantikan Rambut	1921
68	Tata Rias Pengantin	1726
69	Topografi	1
70	Batik	9
71	Kerajinan Tangan	12
72	Pengobatan Tradisional	12
73	Teknisi HP	8
74	Lain-lain	1464
JUMLAH		29.046

Sumber: www.infokursus.net, 18 Juli 2017

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program oleh Pembinaan Kursus dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review LAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2013, sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang

- Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA–023.05.1.666870/2016, tanggal 7 Desember 2015.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan;

9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan;
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
2. Subdirektorat Kurikulum;
3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik dan Kemitraan;
5. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat;
4. Penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran direktorat serta pendanaan kursus dan pelatihan;
6. Penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas Seksi Program dan Seksi Evaluasi.

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan.
2. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan

anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan serta penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Kurikulum

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas Seksi Pembelajaran dan Seksi Penilaian:

1. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu pembelajaran, evaluasi, dan laporan di bidang pembelajaran kursus dan pelatihan.
2. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu penilaian, evaluasi, dan laporan di bidang penilaian dan sertifikasi kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kursus dan pelatihan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas Seksi Sarana dan Seksi Prasarana:

1. Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana, fasilitasi penjaminan mutu sarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana kursus dan pelatihan.
2. Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi prasarana, fasilitasi penjaminan mutu prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, dan

pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola kursus dan pelatihan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan terdiri atas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik serta Seksi Kemitraan.

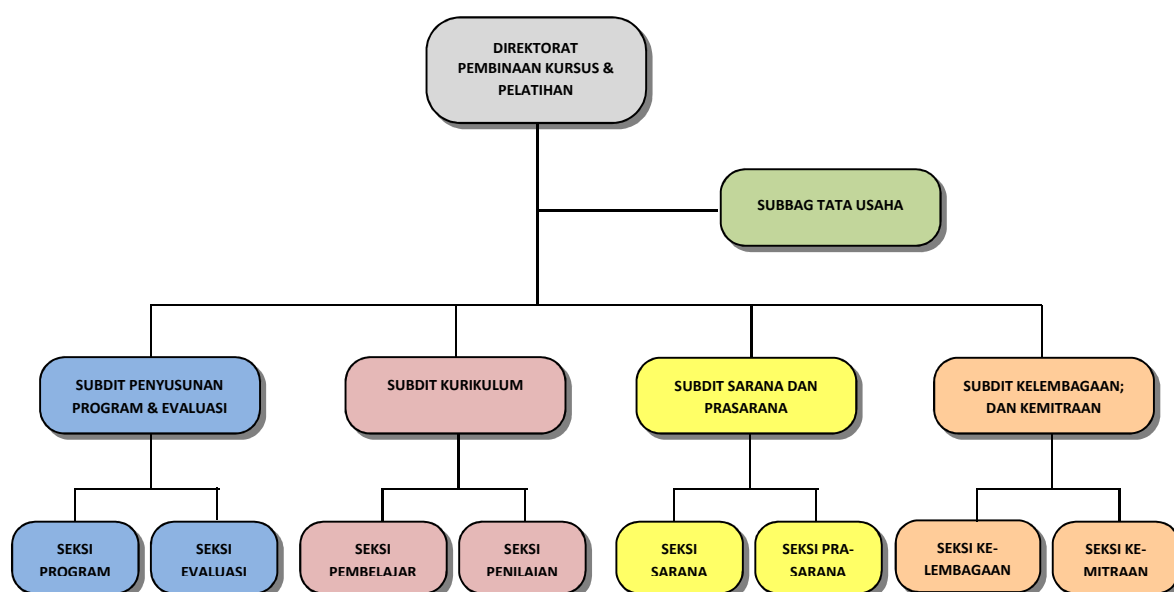
1. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, serta pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik kursus dan pelatihan.

2. Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan kursus dan pelatihan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagan struktur organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Data ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) subbagian Tata Usaha. Berikut disajikan data pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan setiap unit kerja:

Tabel 6. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Per Subdit

NO	Subdit	JUMLAH	Total	%
----	--------	--------	-------	---

		PNS	CPNS	Honorar		
1	Direktur	1	-	-	1	1.08%
2	Subdit Program dan Evaluasi	13	-	2	15	16.3%
3	Subdit Kurikulum	13	-	1	14	15.21%
4	Subdit Sarana dan Prasana	14	-	3	18	19.56%
5	Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	13	-	2	17	18.47%
6	Subbagian Tata Usaha	17	-	13	27	29.38%
Jumlah		71	-	21	92	100%

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa pegawai yang berstatus PNS sebanyak 71 orang atau 77,17% dan honorar sebanyak 21 orang atau 22,83%.

Tabel 7. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	Honorar	Jumlah	%
1	Laki-laki	38	17	55	59,78%
2	Perempuan	33	4	37	40,22%
Jumlah		71	21	92	100%

Dari tabel diatas bisa jelaskan bahwa pegawai masih didominasi dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 59,78% sedangkan perempuannya hanya 40,22%.

Tabel 8. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	CPNS	Honorar	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	0.00%
2	SMP	1	-	2	3	3.26%
3	SMA	15	-	8	23	25.00%
4	Diploma	2	-	4	6	6.32%
5	Sarjana	35	-	7	42	45.65%
6	Master	15	-	-	15	16.30%
7	Doktor	3	-	-	3	3,26%
Jumlah		71	-	21	92	100%

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan, dapat dikatakan bahwa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki SDM cukup baik dengan mayoritas berpendidikan sarjana (45,65%). Akan lebih baik lagi jika yang belum sarjana, didorong untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja sambil belajar, sehingga PNS diharapkan berpendidikan sarjana mencapai sedikitnya 75%.

D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global.

Yang menjadi isu utama dalam sasaran strategis yaitu adalah terkait dengan kesiapan setiap warga masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sekarang sudah berjalan serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya saing individu menjadi tugas utama bagi institusi untuk dapat terus dikembangkan agar dapat bersaing di dunia internasional. Selain itu diperlukannya perspektif baru dalam pengembangan dan revitalisasi program pendidikan kejuruan melalui pendidikan nonformal yang lebih berkualitas dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang proporsional baik di perdesaan maupun perkotaan.

Kesepakatan antar negara ASEAN membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 dan sudah berjalan sejak awal tahun 2017 ini merupakan bentuk realisasi dan tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. **Pertama**, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah besar dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. **Kedua**, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang akan menciptakan iklim persaingan yang adil meliputi perlindungan terhadap sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi, menghilangkan sistem *double taxation*, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*. **Ketiga**, MEA akan memprioritaskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan dinamisme UKM dan memfasilitasi akses mereka

terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan serta teknologi. **Keempat**, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global (*ASEAN Economic Blueprint*).

Bagi Indonesia, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Pada tahap awal pelaksanaan MEA, sudah disepakati 18 jenis jabatan pekerjaan atau keterampilan yang siap dibuka bagi para pekerja dari dan ke berbagai wilayah atau negara di Asia Tenggara. Jenis pekerjaan atau ketrampilan tersebut, antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, arsitektur, pendidikan, akuntan, pariwisata, pelayanan hukum, telekomunikasi, layanan teknik, komputer dan layanan yang terkait dengan komputer, lingkungan, audio visual, energi, konstruksi, logistik, pengiriman barang, maritim dan distribusi barang serta jasa. Yang menjadi kendala dari sisi ketenagakerjaan adalah sisi pendidikan dan produktifitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta pondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka sejak Bulan Januari 2012 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan (formal, nonformal dan informal) dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan, pengalaman kerja atau dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Skotlandia, Hongkong dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah di setarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga

kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi yang dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah banyak secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama pengembangan sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk mencapai 236 juta pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), maka diperkirakan jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka menyongsong terjadinya "bonus demografi" yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam agenda pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam 9 Nawacita yang sudah disusun, pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan produktivitas rakyat. Hal tersebut tertuang didalam Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dan Nawacita ke 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

A. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Untuk menjawab tantangan isu strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam unit kerja yang sama. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku pucuk pimpinan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, memiliki tanggung jawab untuk memperoleh capaian target sebagaimana telah dituangkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi tentang komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selaku pemberi amanah dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku penerima amanah, dalam tugasnya untuk menjawab isu strategis yang tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019. Di dalamnya mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari hingga Desember 2017. Dalam hal ini, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen melaksanakan tugas dan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan. Sesuai fungsinya selaku pimpinan Unit Kerja yang memiliki beberapa subdirektorat di dalamnya, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen untuk: 1) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 3) meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan; 4) memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan; 5) mempertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan

yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan; 6) memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan; 7) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 8) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan; 9) melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; dan 10) melaksanakan administrasi Direktorat.

B. Target Capaian dan Indikator Kinerja

Target yang harus dicapai oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dijabarkan dalam sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, yaitu "Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, Berwawasan Gender, Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global".

Dalam upaya pencapaiannya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 14 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan 3 indikator kinerja pendukung serta 4 output dari program-program yang dilaksanakan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendukung IKK tersebut. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan organisasi, dari 14 indikator kinerja utama tersebut terdapat 1 indikator yang sudah tidak menjadi tanggungjawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tanggungjawab UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu tertentu (SMART). Penetapan indikator kinerja ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, konsultasi sesuai dengan rencana strategis arah kebijakan umum, penilaian dan pemilihan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengelolaan keuangan dan kinerja, untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sebuah akuntabilitas.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengelola anggaran sebanyak Rp 302.414.098.000 berdasarkan DIPA awal yang terbit pada tanggal 7 Desember 2016. Kemudian terbit DIPA Revisi 01 pada tanggal 28 Juli 2017 dengan jumlah alokasi anggaran sama dengan DIPA Awal yang memuat *selfblocking* anggaran. Selanjutnya terbit DIPA Revisi 02 pada tanggal 14 Agustus 2017 dimana terdapat pemotongan anggaran dibandingkan dengan DIPA revisi sebelumnya menjadi Rp 279.275.806.000.

Sesuai amanat Perjanjian Kinerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah mengelola anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir diatas dengan didukung oleh empat belas indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja dengan target sebanyak 90.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.882.125.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 50.000 orang dengan total anggaran sebesar Rp 94.183.567.000.
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha dengan target sebanyak 50.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 119.771.200.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 40.000 orang dengan total anggaran sebesar Rp 116.254.890.000.
3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional dengan target sebanyak 20 kabupaten/kota dan alokasi anggaran sebesar Rp 8.047.475.000. Target tersebut mengalami perubahan dengan adanya perubahan arah kebijakan penyelenggaraan program menjadi 91 lembaga, dan anggaran diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah menjadi Rp 6.877.475.000.
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan
Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu: Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan dengan target sebanyak 37 naskah dan alokasi anggaran sebesar

Rp 3.366.735.000. Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 32 naskah dengan total anggaran sebesar Rp 3.224.715.000.

5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 3 output yaitu: 1) Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja; 2) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional; dan 3) Layanan Internal (Overhead) dengan target sebanyak 900 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 7.137.255.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 6.753.839.000 dengan target sasaran sebanyak 781 lembaga.

6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu: Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan dengan target sebanyak 5 naskah dan alokasi anggaran sebesar Rp 5.039.900.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 3.115.018.000 dengan target sasaran sebanyak 31 naskah.

7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional; dengan target sebanyak 350 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 3.726.700.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 2.367.251.000 dengan target sasaran sebanyak 67 lembaga.

8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja; dengan target sebanyak 140.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 34.196.050.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 24.444.443.000 dengan target sasaran menjadi 45.066 orang.

9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis

Pencapaian IKK ini didukung oleh 2 output yaitu: 1) Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja; 2) Layanan Internal (Overhead); dengan target sebanyak 1.022 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 2.979.060.000. Setelah mengalami

efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 2.665.580.000 dengan target sasaran sebanyak 512 lembaga.

10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional; dengan target sebanyak 5.194 lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp 1.517.484.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 750.203.000 dengan target sasaran menjadi 2.000 lembaga.

11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi

IKK sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi UPT PP- PAUD dan DIKMAS dan BP-PAUD dan DIKMAS.

12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional; dengan target sebanyak 250 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 1.054.220.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 743.450.000 dengan target sasaran menjadi 140 orang.

13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja; dengan target sebanyak 30.000 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.678.380.000. Untuk IKK ini dari awal penyusunan anggaran (RKA-KL) target sasaran hanya 1.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp 4.678.380.000, yang mengalami penurunan menjadi Rp 4.122.975.000 setelah efisiensi anggaran.

14. Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Layanan Internal (Overhead); dengan target sebanyak 2 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp 3.590.325.000. Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 3.040.231.000.

Dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, memerlukan sebuah kerjasama tim (*teamwork*) yang solid dan didukung oleh kualitas SDM yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan program-programnya. Setiap Kepala Subdirektorat yang ada di dalam unit kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki tanggungjawab untuk membawa timnya kepada keberhasilan pencapaian target output yang telah ditetapkan.

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2017, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut

A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan satu sasaran strategis yaitu "Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global" yang didukung oleh 14 indikator kinerja kegiatan utama yaitu: 1) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja; 2) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha; 3) Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan; 4) Jumlah standar program kursus dan pelatihan; 5) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan; 6) Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional; 7) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina; 8) Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji Kompetensi; 9) Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis; 10) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi; 11) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi; 12) Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi; 13) Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan 14) Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

Dari keempat belas IKK tersebut, ada 1 IKK yang secara fungsi sudah bukan menjadi kewenangan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yaitu "IKK [11] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi" yang sudah menjadi kewenangan UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas melalui program pemetaan mutu lembaga sejak tahun 2017.

Keempat belas IKK tersebut tidak semuanya bisa mencapai target 100 persen karena adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran baik dalam bentuk pengalihan ke program prioritas maupun efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal dan tengah tahun anggaran 2017. Berikut tingkat ketercapaian empat belas indikator kinerja kegiatan utama dan 4 indikator kinerja pendukung dari sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selama tahun 2017 yang diuraikan berdasarkan pengukuran kinerja.

Tabel 9. Capaian IKK Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global	[1]	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	90.000	Orang	94.183.567.000	55.837	Orang	62,04%	138.729.534.086	80.88%	50.014	Orang	55,57%	94.164.305.500	99,98%
		a Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	50.000	Orang	94.183.567.000	55.837	Orang	82,72%	138.729.534.086	80.88%	50.014	Orang	100,03%	94.164.305.500	99,98%
	[2]	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	50.000	Orang	116.254.890.000	22.129	Orang	73,76%	69.287.631.241	86.91%	40.035	Orang	80,07%	116.233.822.100	99,98%
		a Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	40.000	Orang	116.254.890.000	22.129	Orang	89,59%	69.287.631.241	86.91%	40.035	Orang	100,09%	116.233.822.100	99,98%
	[3]	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	20	kab/kota	6.877.475.000	5	Kab/Kota	33,33%	1.932.004.900	62.46%	136	Kab/Kota	680%	6.868.933.500	99,88%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik		Anggaran	Fisik		%	Anggaran	%	Fisik		%	Anggaran	%
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	91	Lemba ga	6.877.475.000	5	Kab/ Kota	100,00%	1.932.004.900	62,46%	136	Kab/ Kota	149,45%	6.868.933.500	99,88%
	[4]	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	37	naskah	3.224.715.000	21	Naskah	58,33%	6.946.785.182	87,76%	37	Naskah	100,00%	3.106.170.000	96,32%
	a	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan	32	Naska h	3.224.715.000	21	Naskah	100,00%	6.946.785.182	87,76%	37	Naskah	115,63%	3.106.170.000	96,32%
	[5]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan	900	Lemba ga	6.753.839.000	1.044	Lemba ga	116,00%	20.198.109.591	83,82%	759	lembag a	84,33%	6.739.833.964	99,79%
	a	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	612	Lemba ga	2.704.204.000	-	-	-	-	-	601	lembag a	98,20%	2.697.370.753	99,75%
	b	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	142	Lemba ga	3.095.125.000	1.044	Lemba ga	116,00%	20.198.109.591	83,82%	131	lembag a	92,25%	3.090.693.211	99,86%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik		Anggaran	Fisik		%	Anggaran	%	Fisik		%	Anggaran	%
	c	Layanan Internal (Overhead)	27	Lemba ga	954.510.000	-	-	-	-	-	27	Lemba ga	100%	951.770.000	99,71%
	[6]	Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	5	Naska h	3.115.018.000	34	Naska h	680,00%	8.097.133.673	69.31%	32	Naska h	640,00%	3.103.396.000	99,63%
	a	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan	31	Naska h	3.115.018.000	34	Naska h	680,00%	8.097.133.673	69.31%	32	Naska h	103,23%	3.103.396.000	99,63%
	[7]	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	350	lemba ga	2.367.251.000	158	Lemba ga	60,07%	5.652.410.137	93.52%	225	Lemba ga	64,29%	2.355.244.000	99,49%
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	67	Lemba ga	2.367.251.000	158	Lemba ga	100%	5.652.410.137	93.52%	67	Lemba ga	100,00%	2.355.244.000	99,49%
	[8]	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi	140.000	orang	24.444.443.000	87.749	Orang	81.24%	9.678.065.904	94.11%	46.236	Orang	33,03%	24.406.250.093	99,84%
	a	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	45.066	orang	24.444.443.000	87.749	Orang	109%	9.678.065.904	94.11%	46.236	Orang	102,60%	24.406.250.093	99,84%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik		Anggaran	Fisik		%	Anggaran	%	Fisik		%	Anggaran	%
	[9]	Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	1.022	lembaga	2.665.580.000	180	Lemba ga	17,61%	1.006.820.484	66,79%	474	Lemba ga	46,38%	2.660.673.400	99,82%
	a	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	480	lembaga	2.163.300.000	180	Lemba ga	36,00%	1.006.820.484	65,45%	447	Lemba ga	93,13%	2.161.699.300	99,93%
	b	Layanan Internal (Overhead)	32	Lemba ga	502.280.000	-	-	-	-	-	27	Lemba ga	84,38%	498.974.100	99,34%
	[10]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	5.194	lembaga	750.203.000	1.039	Lemba ga	20,40%	572.206.500	57,88%	13.101	Lemba ga	252,23%	748.088.000	99,72%
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	2.000	lembaga	750.203.000	1.039	Lemba ga	103,90%	572.206.500	57,88%	13.101	Lemba ga	655,05%	748.088.000	99,72%
	[11]	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	3.000	lembaga	-	749	Lemba ga	29,96%	3.213.565.360	87,31%	-	Lemba ga	-	-	-
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	-	lembaga	-	749	Lemba ga	99,87%	3.213.565.360	87,31%	-	Lemba ga	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik		Anggaran	Fisik		%	Anggaran	%	Fisik		%	Anggaran	%
	[12]	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	250	Orang	743.450.000	194	Orang	110,86%	1.598.869.386	81.03%	374	Orang	180,78%	739.032.050	99,41%
	a	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	140	Orang	743.450.000	194	Orang	110,86%	1.598.869.386	81.03%	180	Orang	128,57%	739.032.050	99,41%
	[13]	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	30.000	Orang	4.122.975.000	1.030	Orang	3,96%	4.078.955.940	83.17%	2.030	Orang	6,77%	4.121.293.954	99,96%
	a	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	1.000	Orang	4.122.975.000	1.030	Orang	103,00%	4.078.955.940	83.17%	1.000	Orang	100,00%	4.121.293.954	99,96%
	[14]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	2	Dokumen	3.040.231.000	3	Dokumen	150,00%	2.316.389.963	54.94%	3	Dokumen	150,00%	3.010.382.500	99,02%
	a	Layanan Internal (Overhead)	3	Dokumen	3.040.231.000	3	Dokumen	100,00%	2.316.389.963	54.94%	3	Dokumen	100,00%	3.010.382.500	99,02%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output		Target 2017		Realisasi 2016				Realisasi 2017						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
	[15]	Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	4	Dokumen	9.971.685.000	14	Dokumen	350,00%	1.867.633.200	74,11%	14	Dokumen	350,00%	8.460.334.665	84,84%
	a	Layanan Internal (Overhead)	13	Dokumen	936.592.000	14	Dokumen	100,00%	1.867.633.200	74,11%	13	Dokumen	100,00%	921.309.800	98,37%
	b	Layanan Perkantoran	1	Dokumen	9.035.093.000	-	-	-	-	-	1	Dokumen	100,00%	7.539.024.865	83,44%
	[16]	Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran	1	Unit	540.150.000	2	Unit	100,00%	9.124.469.866	94,77%	2	Unit	200,00%	535.598.000	99,16%
	a	Layanan Perkantoran	2	Unit	540.150.000	2	Unit	100,00%	9.124.469.866	94,77%	2	Unit	100,00%	535.598.000	99,16%
	[17]	Kendaraan Operasional Perkantoran	-	Unit	220.334.000	2	Unit	100,00%	575.750.000	97,03%	-	Unit	-	-	-
	a	Layanan Internal (Overhead)	1	Unit	220.334.000	2	Unit	100,00%	575.750.000	97,03%	-	Unit	-	-	-

Keterangan: IKK 15 s.d 17 adalah IKK yang tidak termasuk di dalam perjanjian kinerja

1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja

Realisasi dari IKK ini adalah 50.014 orang (55,57%) dari target renstra sebanyak 90.000 orang, terdiri dari 49.600 orang realisasi program PKK dan 414 orang realisasi program PKK Unggulan (PKKU). Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 50.000 orang maka realisasi IKK ini melampaui target sebesar 100,03%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi secara mandiri dengan tujuan untuk bekerja ataupun yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I, APBD II dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.



Gambar 3. Pembelajaran Program PKK Bidang Tata Boga, Tata Kecantikan Kulit dan Spa

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atau *life skill* secara umum diartikan sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada kursus dan pelatihan dimaknai sebagai program keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pendidikan vokasi untuk

memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja pada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada sektor formal sesuai dengan peluang kerja yang ada. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diselenggarakan pada kurun waktu 2010 - 2015.

Untuk mengoptimalkan *outcome* program tersebut, lembaga yang menyelenggarakan program PKK ini harus menggunakan metode 4 in 1 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyelenggara diprioritaskan memiliki informasi lowongan kerja (*job order*) dari unit-unit usaha atau industri yang bersedia menerima lulusan;
- b. Peserta didik dilatih sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan meliputi pengetahuan tentang etos kerja, kemampuan manajerial, sikap dan tata nilai, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kurikulum yang wajib digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau kurikulum/silabus yang diterbitkan oleh instansi lain atau lembaga yang bersangkutan untuk jenis-jenis keterampilan yang belum tersedia KBK-nya;
- c. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik wajib diikutsertakan dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Jika jenis pendidikan/keterampilan yang diselenggarakan belum ada LSK-nya maka uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang diakui dan dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah yang relevan;
- d. Menyalurkan lulusannya untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat tidak mampu yang diprioritaskan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau anggota keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS), putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), belum pernah mengikuti program sejenis dari Direktorat Pembinaan Kursus dan

Pelatihan sebelumnya, belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur, berusia 16-40 tahun, bukan peserta didik reguler pada lembaga kursus penyelenggara PKK, serta tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD atau sumber lain seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

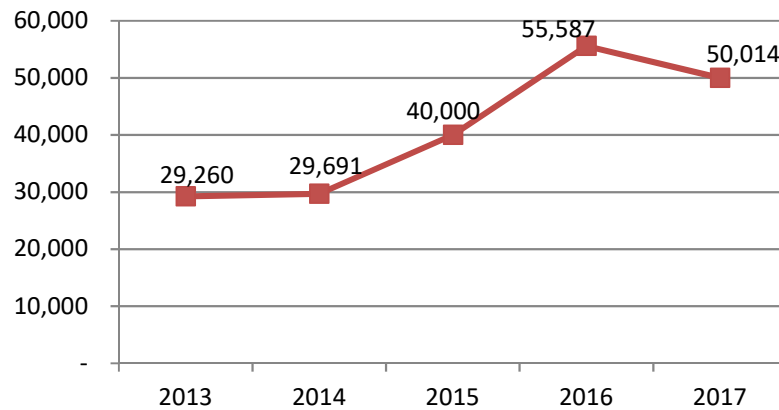
Pemberian bantuan pemerintah program PKK ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya review petunjuk teknis bantuan PKK, penilaian dan verifikasi proposal, orientasi teknis bagi penyelenggara program bantuan PKK, bimbingan teknis program bantuan serta manajemen pengelolaan dana bantuan. Bimbingan teknis program bantuan diselenggarakan untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah dari proses seleksi, verifikasi hingga penetapan usulan ke Ditbinsuslat kepada utusan 29 UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas, dikarenakan tahun 2017 merupakan pertama kalinya UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas diberikan wewenang dalam seleksi bantuan pemerintah PKK sampai pada pengusulan calon penyelenggara.

Ketercapaian IKK ini dilihat hanya melalui satu output, yaitu: Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja. Berikut tingkat ketercapaian output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja:

Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja	1. Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	67.500 orang	55.837 orang	82,72	50.000 orang	50.014 orang	100,03

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output "Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja" jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai 100,03%. Jumlah realisasi sasaran pada tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 10,43% dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2016 sebanyak 55.837 orang karena target dan anggaran yang ditetapkan diawal dan setelah mengalami efisiensi juga mengalami penurunan. Berikut realisasi IKK tersebut selama 5 tahun terakhir:



Grafik 1. Jumlah Realisasi Program PKK/PKH Tahun 2013-2017

Pelaksanaan program PKK ini disalurkan melalui Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan), namun proses seleksi tidak hanya dilakukan di Pusat namun juga dilakukan oleh PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas yang merupakan UPT Ditjen PAUD dan Dikmas di 29 provinsi. Sedangkan seleksi PKKU dilakukan di Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Berikut adalah tabel realisasi PKK di tingkat provinsi dan pusat:

Tabel 11. Jumlah Realisasi Program PKK Tahun 2017

No.	PP-BP PAUD dan DIKMAS	Realisasi Kuota PKK		Dana (000)
		Lbg	Psd	
1	Aceh	19	480	816.000
2	Sumatera Utara	213	5.331	9.062.700
3	Sumatera Barat	23	520	884.00
4	Riau	17	435	739.500
5	Jambi	4	95	161.500
6	Sumatera Selatan	25	705	1.198.500
7	Bengkulu	4	110	187.000
8	Lampung	5	105	178.500
9	Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	80	1.895	3.221.500
13	Jawa Tengah	52	1.280	2.176.000
14	D.I. Yogyakarta	17	380	646.000
15	Jawa Timur	269	5.045	8.576.500
16	Banten	27	745	1.266.500
17	Bali	6	160	272.000
18	Nusa Tenggara Barat	10	264	448.800
19	Nusa Tenggara Timur	14	360	612.000
20	Kalimantan Barat	25	500	850.000
21	Kalimantan Tengah	8	185	314.500
22	Kalimantan Selatan	2	40	68.000

No.	PP-BP PAUD dan DIKMAS	Realisasi Kuota PKK		Dana (000)
		Lbg	Psd	
23	Kalimantan Timur	19	430	731.000
24	Sulawesi Utara	8	160	272.000
25	Sulawesi Tengah	72	1.625	2.762.500
26	Sulawesi Selatan	79	1.775	3.017.500
27	Sulawesi Tenggara	63	1.574	2.675.800
28	Gorontalo	35	828	1.407.600
29	Sulawesi Barat	20	490	833.000
30	Maluku	3	80	136.000
31	Maluku Utara	5	140	238.000
32	Papua Barat	-	-	-
33	Papua	22	660	1.122.000
34	Kalimantan utara	-	-	-
Provinsi		1.146	26.397	43.990.900
34	Ditbinsuslat			
	PKK	828	23.203	40.329.100
	PKKU	18	414	4.000.000
Total Keseluruhan		1.992	50.014	88.320.000

Keterangan:

Untuk Provinsi Bangka Belitung (1 lbg 40 PD), Kepulauan Riau (5 lbg 190 PD), DKI Jakarta (24 lbg 625 PD), Papua Barat (2 lbg 60 PD), dan Kalimantan Utara (3 lbg 60 PD) masuk di penetapan UPT terdekat atau Ditbinsuslat sesuai Juknis

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi bantuan yang belum merata di masyarakat;
- Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan di PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas terlambat dilakukan;
- Komposisi dan kompetensi SDM di beberapa PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas kurang mendukung pelaksanaan program.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- Mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak untuk mensosialisasikan bantuan;
- Petunjuk teknis program bantuan sudah disampaikan pada awal tahun saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan;
- Penarikan anggaran dipercepat untuk memenuhi kuota PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas;
- Koordinasi dengan PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap minggu dan melakukan

pendampingan serta memberikan solusi dari permasalahan yang muncul di PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas dalam mengeksekusi program bantuan PKK ini;

- e. Memberikan peningkatan kapasitas kepada tim penilai di tingkat PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas dan penanggungjawaban program bantuan di awal tahun 2017.

2. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan/Berwirausaha

Realisasi dari IKK ini adalah 40.035 orang (80,07%) dari target renstra sebanyak 50.000 orang, terdiri dari 39.700 orang realisasi PKW dan 335 orang realisasi PKW Unggulan (PKWU). Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 40.000 orang maka realisasi IKK ini melampaui target sebesar 100,09%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi secara mandiri dengan tujuan untuk berwirausaha serta yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I, APBD II dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan PNF lainnya, Organisasi mitra kursus dan asosiasi profesi, DUDI, serta lembaga pendidikan yang melaksanakan fungsi vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan selama kurun waktu 2010 - 2015.





*Gambar 4. Pembelajaran Program PKW
Bidang Spa dan Tata Boga (Pastry and Bakery)*

Untuk mengoptimalkan *outcome* program tersebut, lembaga yang menyelenggarakan program PKW ini harus menggunakan metode 4 in 1, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Peluang Usaha

- 1) Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional, khususnya dalam konteks menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 2) Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi potensi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai dengan peluang pasar pada skala lokal, nasional maupun internasional yang ada;

Apabila hasil identifikasi peluang usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga dan jelas peluang usahanya, maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKW.

b. Pembelajaran Kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha

Proses pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan dalam Program Pendidikan

Kecakapan Wirausaha (PKW) dilaksanakan sesuai dengan peluang usaha hasil identifikasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran program PKW diperlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: 1) Perubahan pola pikir; 2) Membangun karakter pengusaha; 3) Memulai usaha; 4) Merencanakan usaha; 5) Memasarkan dan mengembangkan usaha; dan f) Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.

c. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

d. Pendampingan dan Perintisan Usaha

Peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Lembaga juga melakukan pendampingan untuk memfasilitasi dalam mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat menganggur dan/atau belum memiliki pekerjaan tetap, putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), berusia 16-40 tahun, direkrut khusus (kelas khusus) pada lembaga kursus penyelenggara PKW, harus dipisahkan dengan peserta didik reguler (swadaya) pada lembaga penyelenggara PKW, serta tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pemberian bantuan pemerintah program PKW ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya penyusunan petunjuk teknis dan instrumen penilaian PKW, penilaian proposal PKW, penilaian dan verifikasi lapangan, orientasi teknis penyelenggaraan PKW, penyusunan/review modul kewirausahaan, pendampingan pelaksanaan program PKW, evaluasi program PKW, dan Pengolahan data Program Indonesia Pintar. Penyusunan/review modul kewirausahaan dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap modul kewirausahaan yang telah disusun dan diimplementasikan tahun 2016. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi lapangan terhadap

implementasi modul kewirausahaan tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan penanaman mental wirausaha bagi pengelola Program PKW dalam rangka memberikan pendampingan bagi rintisan usaha peserta didik termasuk kepemimpinan (*leadership*), untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan Program PKW tahun 2017. Terdapat 6 modul kewirausahaan yang dihasilkan, yaitu Perubahan Pola Pikir dan Karakter, Kekuatan Tujuan, Mempengaruhi dan Membangun Tim, *Coaching* untuk Mengembangkan Orang Lain, Pemasaran *Offline* dan *Digital Marketing*. Pengolahan data Program Indonesia Pintar dilakukan untuk memilah daftar peserta didik program PKW yang sesuai dengan persyaratan penerima bantuan PIP hingga kepada penetapan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur dalam rangka mendukung program prioritas Presiden.

Ketercapaian IKK ini dilihat hanya didukung satu output, yaitu: Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha. Berikut tingkat ketercapaian output Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha:

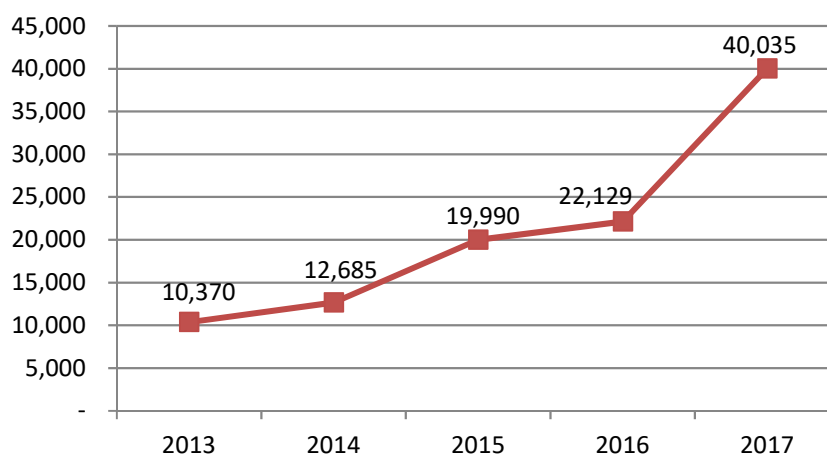
Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	1. Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha	24.700 orang	22.129 orang	89,59	40.000 orang	40.035 orang	100,09

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output "Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha" jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai 100,09%.

Realisasi PKWU melebihi target sebesar 11,67% dengan melakukan efisiensi pada satuan biaya bantuan untuk beberapa jenis keterampilan tertentu (tidak diberikan maksimal 10 juta untuk setiap peserta didik tergantung dari perencanaan bisnis yang sudah disusun) sehingga alokasi anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah sasaran.

Jumlah realisasi sasaran PKW pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 80,92% dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2016 karena target sasaran dan anggaran juga meningkat. Realisasi ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:



Grafik 2. Jumlah Realisasi Program PKW/PKM Tahun 2013-2017

Orientasi teknis Program PKW dilakukan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi, efisiensi dilakukan dalam hal penggunaan anggaran. Pelaksanaan orientasi teknis Program PKW tingkat pusat dilaksanakan sebanyak 3 tahap sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan di tingkat provinsi, efisiensi anggaran dilakukan dalam bentuk pembagian/kombinasi tim teknis dan tim keuangan untuk melaksanakan orientasi teknis Program PKW di beberapa provinsi secara paralel (pada waktu yang bersamaan) dengan mempertimbangkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki.

Pelaksanaan program PKW ini disalurkan melalui Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan), namun proses seleksi tidak hanya dilakukan di Pusat namun juga dilakukan PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas yang merupakan UPT Ditjen PAUD dan Dikmas di 29 provinsi, sedangkan seleksi PKWU dilaksanakan di Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Berikut adalah tabel realisasi PKW di tingkat provinsi dan pusat:

Tabel 13. Jumlah Realisasi Kuota Program PKW Tahun 2017

No	Provinsi	Realisasi PKW		Dana (000)
		Lbg	Psd	
1	Aceh	62	1.435	3.874.500

No	Provinsi	Realisasi PKW		Dana (000)
		Lbg	Psd	
2	Sumatera Utara	40	865	2.335.500
3	Sumatera Barat	14	280	756.000
4	Riau	26	585	1.579.500
5	Jambi	21	425	1.147.500
6	Sumatera Selatan	19	430	1.161.000
7	Bengkulu	26	535	1.444.500
8	Lampung	4	100	270.000
9	Bangka Belitung	1	20	54.000
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	64	1.445	3.901.500
13	Jawa Tengah	29	660	1.782.000
14	D.I. Yogyakarta	22	475	1.282.500
15	Jawa Timur	137	2.865	7.735.500
16	Banten	88	1.850	4.995.000
17	Bali	21	520	1.404.000
18	Nusa Tenggara Barat	40	900	2.430.000
19	Nusa Tenggara Timur	20	465	1.255.500
20	Kalimantan Barat	16	330	891.000
21	Kalimantan Tengah	2	50	135.000
22	Kalimantan Selatan	3	60	162.000
23	Kalimantan Timur	21	465	1.255.500
24	Sulawesi Utara	5	105	283.500
25	Sulawesi Tengah	29	730	1.971.000
26	Sulawesi Selatan	14	320	864.000
27	Sulawesi Tenggara	45	935	2.524.500
28	Gorontalo	28	615	1.660.500
29	Sulawesi Barat	16	325	877.500
30	Maluku	9	190	513.000
31	Maluku Utara	7	155	418.500
32	Papua Barat	-	-	-
33	Papua	14	285	769.500
34	Kalimantan utara	3	65	175.500
Provinsi		846	18.485	49.909.500
35	Ditbinsuslat			
	PKW	845	21.215	57.280.500
	PKWU	22	335	3.000.000
Total Keseluruhan		1.713	40.035	110.190.000

Keterangan:

Untuk Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Kalimantan Utara masuk di penetapan UPT terdekat atau Ditbinsuslat sesuai Juknis

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan output ini tidak jauh beda dengan bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja, yaitu:

- a. Sosialisasi bantuan yang belum merata di masyarakat;

- b. Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan di provinsi terlambat dilakukan.
- c. Komposisi SDM di sebagian provinsi kurang mendukung pelaksanaan program.

Upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak untuk mensosialisasikan bantuan;
- b. Petunjuk teknis program bantuan sudah disampaikan pada awal tahun saat kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan dilaksanakan;
- c. Koordinasi dengan provinsi secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap minggu dan melakukan pendampingan serta memberikan solusi dari permasalahan yang muncul di provinsi dalam mengeksekusi program bantuan PKW ini;
- d. Memberikan peningkatan kapasitas kepada tim penilai di tingkat PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas dan penanggungjawaban program bantuan di awal tahun 2017.

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

Realisasi dari IKK ini adalah 136 lembaga (680%) dari target renstra sebanyak 20 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 91 lembaga maka realisasi IKK ini melampaui target sebesar 149,45%.

IKK ini awalnya diperuntukkan untuk membuat *centre of excellent* atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka desain dari IKK ini diperuntukkan untuk memberikan bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dan SKB dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi lembaga dan menyesuaikan dengan tuntutan DUDI. Hal inilah yang menyebabkan jumlah realisasi menjadi bertambah besar yang tersebar di banyak kabupaten/kota. IKK ini juga menjadi target Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk diusulkan kedalam perubahan renstra.

Program bantuan sarana praktik kursus dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan program pembinaan kepada LKP dan SKB (yang telah menjadi satuan

pendidikan nonformal) melalui penambahan kuantitas dan kualitas sarana praktik untuk meningkatkan mutu pembelajaran praktik kursus dan pelatihan serta selaras dengan kebutuhan DUDI.

Sasaran program ini adalah LKP dan SKB (yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal) yang belum pernah menerima bantuan sarana dan prasarana dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun sebelumnya, memiliki ruangan untuk menempatkan sarana praktik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, memiliki pendidik/pamong belajar dengan bidang kompetensi sesuai sarana praktik yang diajukan (memiliki sertifikat kompetensi atau minimal ijazah DIII), serta memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta beroperasi sekurang-kurang 3 tahun (khusus LKP).

Pemberian bantuan sarana praktik kursus dan SKB ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan petunjuk teknis dan instrumen penilaian bantuan sarana praktik kursus dan SKB, penilaian proposal dan verifikasi bantuan, orientasi teknis penyelenggara bantuan, dan pendampingan teknis bantuan sarana praktik kursus dan SKB.

Ketercapaian IKK ini diukur dari satu output saja yaitu lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Berikut tingkat ketercapaian output lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan:

Tabel 14. Capaian IKK 3 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	1. Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional	5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	100,00	91 Kab/ Kota	136 Kab/ Kota	149,45

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: output "lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional" jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 tercapai 149,45%.

Pelaksanaan program ini disalurkan oleh Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) dan berikut adalah realisasinya:

Tabel 15. Penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus dan SKB Tahun 2017

No	Kab/Kota	Nama Lembaga	Jenis Kursus	Jumlah Bantuan
1.	Kab. Nagan	UPTD SKB Nagan Raya	Aplikasi Perkantoran Tingkat Dasar dan Lanjutan	55.000.000
2.	Kab. Lebak	LKP Ratu Juwita	Tata Kecantikan Rambut	60.000.000
3.	Kab. Pandeglang	LKP Jaya Abadi	Komputer	60.000.000
4.	Kab Rejang Lebong	LKP Citra Info Komputer CIKO	Desain Grafis Sarana Komputer	40.000.000
5.	Kab. Kepahiang	LKP Explore Komputer	Komputer Desain Grafis	40.000.000
6.	Kab. Kepahiang	LKP Piksi Global	Komputer Aplikasi perkantoran	60.000.000
7.	Kab. Tasikmalaya	LKP I-Tech Computer Center	Aplikasi Office Perkantoran	60.000.000
8.	Kab. Tasikmalaya	LKP Syabaabul Fikri	Komputer	60.000.000
9.	Kab. Ciamis	LKP GRAPHIC SOLUTION	operator Komputer	60.000.000
10.	Kab. Bandung Barat	LKP Permata	Menjahit	30.000.000
11.	Kota Bandung	LKP Isdayanti	Tata Kecantikan Rambut	30.000.000
12.	Kab. Cianjur	Yayasan Pendidikan Lucky Arel	Tata Rias Pengantin	30.000.000
13.	Kab. Cianjur	LKP Greatexcel- GEC	Komputer Desain Grafis	35.000.000
14.	Kota. Cimahi	LKP Hetty	Tata Rias Pengantin	30.000.000
15.	Kab. Karawang	Tensai Nihongo Bunka Gakuin	Bahasa dan Budaya Kerja Jepang	30.158.000
16.	Kota Bekasi	LPK Adi Busana	Menjahit	32.710.000
17.	Kota Jakarta Pusat	LKP "Meidia Rias"	Tata Rias Pengantin	40.000.000
18.	Kab. Grobogan	LKP Sri Busana	Menjahit Garment	47.722.000
19.	Kab. Kudus	LKP Alfaz	Komputer Desain Grafis	60.000.000
20.	Kab. Rembang	LKP Pin Com	Aplikasi Perkantoran	60.000.000
21.	Batang	LKP MIZZ @COMP	Komputer	60.000.000
22.	Kab. Tegal	LKP NUSA KOMPUTER	Komputer	30.000.000
23.	Kab. Klaten	LKP Sanggar Busana Arbha	Menjahit (Garment)	38.000.000
24.	Kab. Klaten	LKP Kembar	Komputer Desain Graafis	50.000.000
25.	Kab. Boyolali	LKP Marta Luhur	Komputer	60.000.000
26.	Kab. Magelang	LKP Bina Insani	Komputer dan Bahasa Korea	50.000.000
27.	Kota Magelang	LKP Prosmart Institute	Bahasa Inggris	30.000.000
28.	Salatiga	LPK ARVIAN	Tata Kecantikan Rambut	45.000.000
29.	Kab. Bondowoso	LKP. REC Group	Bahasa Inggris	55.000.000
30.	Kab. Jember	Yudistira	Tata Rias Pengantin	50.000.000
31.	Kab. Jember	LKP Kartini	Tata Rias Pengantin	50.000.000
32.	Kab. jombang	LKP Modes Juwita	Menjahit	50.000.000
33.	Kab. Jombang	LKP Bangun Karya	Jahit Sepatu	60.000.000
34.	Kab. Jombang	LKP Modes Sinar Busana	Tata Busana (Menjahit)	50.000.000
35.	Kab. Nganjuk	LKP ROOS Salon	Tata Rias Pengantin	45.000.000
36.	Kab. Trenggalek	LKP BECC Fascho	Komputer	40.000.000
37.	Kab. Tulungagung	LKP Indra Komputer	Desain Grafis	40.000.000
38.	Kab. Tulungagung	LKP "Salon Rosalinda"	Tata Rias Pengantin Solo Putri	50.000.000
39.	Kab. Tulungagung	LKP Menjahit Venice	Menjahit	40.000.000
40.	Kab. Ponorogo	LKP Primabuana	Menjahit	25.000.000
41.	Kota Samarinda	LKP Novan	Tata Kecantikan Rambut	28.395.000
42.	Kab. Pringsewu	LKP Bina Dharma	Desain Grafis	50.000.000
43.	Kab. Pringsewu	LKP. Smart Plus	Desain Grafis Percetakan & Sablon	50.000.000
44.	Kota Bandar Lampung	LKP Ines Salon	Tata Rias Pengantin	56.500.000
45.	Kota Metro	LKP Computer For Smart Kids	Desain Grafis	60.000.000

No	Kab/Kota	Nama Lembaga	Jenis Kursus	Jumlah Bantuan
46.	Kab. Lombok Timur	LP3E	Komputer	60.000.000
47.	Kota Bima	LKP. Mia Taylor	Menjahit (Tata Busana)	48.000.000
48.	Kota Bima	LKP RAHMAT SENTOSA	Komputer	48.000.000
49.	Kota Bima	LKP Mantika N.A	Menjahit	48.000.000
50.	Kab. Lombok Tengah	LKP Bright English Institute	Bahasa Inggris	60.000.000
51.	Kab. Lombok Tengah	LKP ELC	Tata Boga	59.000.000
52.	Kab. Lombok Tengah	Lembaga Kursus DIN'S SALON	Parawisata TRP	60.000.000
53.	Kota Mataram	LKP Mandalika	Jasa Bidang Pariwisata TKR	56.000.000
54.	Kab. Mamasa	LPK Gerish Course	Operator Office	55.000.000
55.	Kota Makassar	LKP Andis	Menjahit (Tata Busana)	40.000.000
56.	Kota Makassar	LKP latna	Tata kecantikan kulit	40.000.000
57.	Kota Parepare	LKP Satria	Teknologi Informasi & Komunikasi	50.000.000
58.	Kab. Agam	LKP Monalita	Tata Busana dan Rias Pengantin	50.000.000
59.	Kab. Tanah Datar Barat	President Computer	Komputer	30.000.000
60.	Payakumbuh	LKP LTIKI	Teknisi Komputer	50.000.000
61.	Kab. Langkat	LKP Harpi Melati	Tata Kecantikan Rambut	60.000.000
62.	Kota Tanjung Balai	LKP Siah Kursus	Komputer Desain Grafis	40.000.000
63.	Kota Tanjung Balai	LKP Bina Putri	Menjahit Pakaian Wanita dan Anak	40.000.000
64.	Kota Bima	LPK GRAND DATA COMPUTER	Disain grafis percetakan	48.000.000
65.	Kota Bima	LPK English Speaking Club	Bahasa Inggris	48.000.000
66.	Kota Bima	Djara Collection	Kursus Menjahit	48.000.000
67.	Aceh Barat	Yayasan Pendidikan Creative YPC	Operator Komputer Desain Grafis dan Teknisi Komputer	35.000.000
68.	Kab. Bireuen	LKP Risna Jaya	Komputer	35.000.000
69.	Badung	Tulip Spa Internasional School	SPA	42.500.000
70.	Kab Lebak	LKP Melati	Tata Kecantikan Rambut TKR	35.000.000
71.	Lebak	LKP Naufal	Komputer	35.000.000
72.	Lebak	LKP Juwita	TKR	30.000.000
73.	Jakarta Barat	LKP Widya Artha	Menjahit	30.000.000
74.	Kota Gorontalo	LKP Hunto	Desain grafis	30.000.000
75.	Kabupaten Bekasi	LKP Herna Muslimah	Tata Kecantikan rambut	30.000.000
76.	Kota Cirebon	LKP Annida	Tata Busana	34.000.000
77.	Kab Tasikmalaya	LKP Sucses	Tata Rias Pengantin	30.000.000
78.	Kab. Kuningan	LKP Soraya	TKR	30.000.000
79.	Kab. Bandung Barat	LKP Pelita Busana	Menjahit	30.000.000
80.	Kab. Bandung Barat	LKP Bunga Mekar	Menjahit garmen	30.000.000
81.	Kota Tasikmalaya	LKP Anugrah Pratama	Menjahit	30.000.000
82.	Kota Tasikmalaya	LKP Simphony Music School	Seni Musik	30.000.000
83.	Subang	LKP Ikna	TRP	35.000.000
84.	Kab Bogor	LKP Mawar	Tata Busana	32.500.000
85.	Kab Bogor	LP3I Course Center Cab. Karadenan	Komputer	32.500.000
86.	Kab Bogor	LKP Brilliant	Aplikasi Perkantoran	32.500.000
87.	Kab Bogor	LPK Ninis	Komputer	32.500.000
88.	Kab Bogor	Lembaga Kursus Lido.com	Komputer Microsoft Office	35.000.000
89.	Kab Bogor	LKP Viderista	Tata Boga	35.000.000
90.	Kab Bogor	LKP Yunita	Menjahit Garmen	35.000.000

No	Kab/Kota	Nama Lembaga	Jenis Kursus	Jumlah Bantuan
91.	Subang	LKP Lambada	Menjahit	35.000.000
92.	Semarang	LKP DESSY	Menjahit Garment	35.000.000
93.	Ponorogo	LPP Mandiri	Tata Boga	35.000.000
94.	Tuban	LKP Eliana Mandiri	Menjahit	32.500.000
95.	Kab. jombang	LKP Modes Hidayah	Tata Busana	32.500.000
96.	Jombang	LKP Alfakom SKB	Komputer Desain Grafis, Video Editing Animasi / web design	35.000.000
97.	Jombang	LKP Modes Devia	Menjahit	35.000.000
98.	Kab. Tulungagung	LKP Salon Ayu	Tata Kecantikan Rambut	32.515.000
99.	Ponorogo	LKP Ishak	TKR	32.500.000
100.	Jombang	UPTD SKB Mojoagung	Menjahit	35.000.000
101.	Kab. Sintang	SPNF SKB Kab. Sintang	Aplikasi Perkantoran	35.000.000
102.	Kab Banjar	LKP Techno Flash	Teknisi Handphone	30.000.000
103.	Kab. Hulu Sungai Selatan	LKP Al-Hidayah Computer	Komputer	30.000.000
104.	Tanah Laut	LKP Shafira Komputer	Komputer	30.000.000
105.	Kota Bontang	LKP Aisyah	TKK	32.500.000
106.	Kab. Bulungan	EC BC English Center of Bulungan Course	Bahasa Inggris	30.000.000
107.	Kab. Lampung Timur	LKP Smart	Komputer	30.000.000
108.	Lombok Timur	Lembaga Nolen Training Center	Mekanik Otomotif	40.000.000
109.	Mataram	Sentral Komputindo Mataram	Komputer	30.000.000
110.	Kab. Timur Tengah Selatan	LKP Jetnis Computer	Aplikasi Perkantoran	30.000.000
111.	Kab Indragiri hilir	LKP Oby Komputer	Komputer	30.000.000
112.	Kab. Maros	SPNF SKB Maros	Menjahit	30.000.000
113.	Kab Wajo	LKP Likmi Stekom	Ketrampilan Komputer	35.000.000
114.	Kota Makassar	YPA Handayani Makassar	Komputer dan Desain Grafis	40.000.000
115.	Kab. Trenggalek	LKP Berlian Komputer	Desain Grafis	30.000.000
116.	Kota Makassar	LKP Ami Resky Amalia	Tata Busana	30.000.000
117.	Kota Makassar	LKP Nurul	TKR	30.000.000
118.	Sungai Penuh	LKP ASYIFA	Tata Kecantikan Rambut	30.000.000
119.	Makassar	LKP Andira Makassar	Menjahit	32.500.000
120.	Kab Luwu	SKB Belopa	Menjahit	35.000.000
121.	Kab. Luwu Timur	LKP Prima Computer	Desain Grafis	30.000.000
122.	Kab. Toraja Utara	LKP Palapa Computer	Komputer Desain Grafis	35.000.000
123.	Kota Palu	LKP Hani Collection	Menjahit Konveksi	35.000.000
124.	Kendari	LKP Ayu Mandiri	Tata Rias Pengantin	40.000.000
125.	Kolaka	LKP LP2W Gema Pemuda	Otomotif Sepeda Motor	45.000.000
126.	Kota Tomohon	LKP Indigo Internasional	Perhotelan	40.000.000
127.	Kota Padang	LKP Hem's Institute	Bahasa Inggris	32.500.000
128.	Kab. Pasaman Barat	LKP Compact Electronic Compute (CEC)	Aplikasi Perkantoran	32.500.000
129.	Kab. Pesisir Selatan	LKP Mandiri	Bahasa Inggris	32.500.000
130.	Ogan Komering Ulu	LPK Dewantara Mandiri	Desain Grafis Jenjang Kualifikasi	32.000.000
131.	Ogan Komering Ulu	LKP Permata Dewi SKB	Komputer Desain Grafis	35.000.000
132.	Oku Timur	LKP Macromedia Computer	Teknisi Komputer	32.500.000
133.	Kota Medan	LPK2 Pascom	Desain Grafis	30.000.000
134.	Kota Medan	LP3TI	Otomotif mobil	50.000.000
135.	Kota Pematang Siantar	LKP M. Queen	Menjahit	35.000.000
136.	Kota Pematang Siantar	LKP Agung	Menjahit	35.000.000

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada anggaran dengan menyesuaikan besar bantuan setiap lembaga dengan sarana praktik yang diperlukan berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan.



Gambar 5. Pemanfaatan Bantuan Sarana Praktik Kursus Bidang Otomotif dan Airbrush serta Tata Kecantikan untuk Proses Pembelajaran

4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan

Realisasi dari IKK ini adalah 37 naskah (100,00%) dari target renstra sebanyak 37 naskah. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 32 naskah maka realisasi IKK ini mencapai 115,63%.

IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan ini ditetapkan dalam rangka penjaminan mutu terhadap lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan amanah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menetapkan berbagai peraturan/regulasi dan program yang meliputi aspek legalitas, sertifikasi kompetensi, dan evaluasi, serta mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP), yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat umum secara luas.

Selain itu, dalam rangka pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan untuk penjaminan mutu (*quality assurance*), telah disusun beberapa standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

diantaranya meliputi standar isi, kompetensi lulusan, pengelolaan, penilaian dan sarana prasarana. Kemudian dengan melihat bahwa semakin dekatnya persaingan pasar global, tuntutan terhadap LKP dalam menghasilkan peserta didik yang kompetitif dan berdaya saing akan semakin meningkat.

Secara umum tahapan penyusunan standar dimulai dengan penyusunan draft, review, validasi, dan finalisasi. Tahap validasi akan melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tim penyusun standar-standar ini terdiri dari akademisi dan praktisi baik dari kalangan perguruan tinggi, asosiasi profesi, konsorsium maupun organisasi mitra kursus dan pelatihan

Standarisasi lembaga kursus dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para penyelenggara kursus dan pelatihan agar memiliki standar dan mutu kelembagaan yang berdaya saing nasional atau internasional.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan:

Tabel 16. Capaian IKK 4 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah standar program kursus dan pelatihan	1. Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan	21 naskah	21 naskah	100	32 naskah	37 naskah	115,63

Pada tahun 2017, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan 32 standar yang terdiri dari standar sarana dan prasarana program kursus dan pelatihan sebanyak 10 naskah, standar sertifikasi instruktur kursus sebanyak 19 naskah, dan bahan ajar kursus dan pelatihan sebanyak 8 naskah. Capaian tahun 2017 ini meningkat 52,38% dari capaian tahun 2016.

a. *Standar Sarana dan Prasarana Program Kursus dan Pelatihan*

Capaian pada tahun 2017 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 10 naskah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 48 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Di antara norma yang ditetapkan tersebut adalah norma sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan proses dan menghasilkan *output*, serta *outcome* pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya faktor sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dipertegas oleh semakin berkembangnya teknologi pada peralatan-peralatan yang digunakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kemajuan peralatan menuntut kompetensi sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan mengembangkan teknologi tersebut.

Dengan perkembangan DUDI yang semakin cepat, LKP sebagai salah satu pemasok SDM harus mampu mengimbangi percepatan itu dengan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai persyaratan DUDI. Ketertinggalan dan keterlambatan dalam menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar akan menjadikan LKP sebagai lembaga pendidikan kelas tiga yang tidak menarik dan ditinggalkan, baik oleh calon peserta didik sebagai sumber pasokan, maupun oleh DUDI sebagai pengguna pasokan SDM.

Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP yang mampu bersaing dalam era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang mudah diserap DUDI, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memandang perlu adanya standar sarana dan prasarana LKP agar dapat memenuhi tantangan-tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang. Mekanisme yang dilakukan untuk merealisasikan hal ini melalui beberapa tahap, yaitu: 1) Review draft standar, 2) Validasi draft standar; 3) Uji publik draft standar; 4) Penelaahan draft standar oleh BSNP; 5) Finalisasi draft standar menjadi standar; 6) Pleno BSNP; 7) Pengajuan draft standar menjadi Permendikbud. Sedangkan penyusunan draft telah dilakukan pada tahun 2016.



Gambar 6. Finalisasi Standar Sarana dan Prasarana bersama praktisi terkait

Kesepuluh standar sarana dan prasarana yang telah disusun dan disetujui BSNP pada tahun 2017 adalah tari tradisional, pendidik PAUD, bordir dan sulam, membatik, desain grafis, CAD, *web design*, *web programming*, teknik kendaraan ringan dan *plumbing*.

Jumlah capaian ini meningkat 200% dibanding dengan capaian tahun 2016 sebanyak 5 naskah. Dengan demikian, total terdapat 30 standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan yang telah disusun sejak tahun 2011 hingga 2017, sebagai berikut:

Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan

No.	Program	Tahun Penyusunan	Keterangan
1	Tata kecantikan kulit	2011	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014
2	Spa		
3	Tata busana	2012	
4	Mekanik sepeda motor		
5	Baby sitter	2013	
6	Mengemudi kendaraan bermotor		
7	Perhotelan	2014	
8	Tata kecantikan rambut		
9	Tata rias pengantin		
10	Tata boga		
11	Bahasa	2015	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016
12	Fotografi		
13	Merangkai bunga kering & bunga buatan		
14	Pijat pengobatan refleksi		
15	Teknisi Akuntansi		
16	Animasi	2016	Telah ditetapkan dengan
17	Pekarya kesehatan		

No.	Program	Tahun Penyusunan	Keterangan
18	Komputer jaringan		Permendikbud Nomor 33 Tahun 2017
19	Teknisi komputer		
20	Las		
21	Pendidik PAUD	2016	Penyusunan 2016, Review-Finalisasi 2017, Proses pengajuan penerbitan Permendikbud
22	Bordir dan sulam		
23	Otomotif mobil (teknik kendaraan ringan)		
24	Desain grafis		
25	Tari tradisonal		
26	Web design		
27	Web Programming		
28	CAD		
29	Membatik		
30	Plumbing		

b. *Standar Sertifikasi Instruktur Kursus*

Capaian pada tahun 2017 ini sebanyak 19 naskah (135,71%), melampaui target yang ditetapkan sebanyak 14 naskah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 48 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Di antara norma yang ditetapkan tersebut adalah norma tenaga pendidik (instruktur).

Tenaga pendidik merupakan salah satu aspek penting dalam menyelenggarakan dan output pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya faktor tenaga pendidik dalam proses pendidikan dipertegas dengan perkembangan DUDI dan persaingan pasar yang semakin kompetitif. LKP sebagai salah satu pemasok SDM harus mampu mengimbangi percepatan itu dengan menyediakan tenaga pendidik (instruktur) yang berkualitas.

Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP untuk mampu bersaing dalam era global dalam hal menciptakan proses pembelajaran yang baik dan mendidik lulusan yang mudah diserap DUDI, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memandang perlu adanya standar sertifikasi instruktur kursus

agar mereka dapat memenuhi tantangan-tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang.

Pada tahun 2017 telah menyusun 14 draft standar sertifikasi instruktur kursus yang meliputi pedoman umum penilaian uji kompetensi dan rubrik penilaian untuk bidang: 1) Pekarya kesehatan, 2) Aplikasi Perkantoran, 3) Teknisi AC, 4) Pengasuh Anak, 5) Akupuntur, 6) Membatik, 7) Bahasa Indonesia Penutur Asing, 8) Perjalanan wisata (*tour and travel*), 9) Pertamanan (*gardening*), 10) Pertukangan (*carpentry*), 11) Penataan bata (*brick laying*), 12) Perancah (*scaffolding*), 13) Perpipaian (*plumbing*), 14) Mekanik alat berat, 15) *Programming-web design*, 16) *Mobile Application Programming*, 17) Tari modern, 18) *Computer Aid Design (CAD)*, 19) Bahasa Mandarin.

c. *Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan*

Capaian pada tahun 2017 ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 8 naskah.

Penyusunan bahan ajar kursus dan pelatihan dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran di lembaga kursus atau satuan pendidikan nonfomal lainnya agar lebih riil dan memudahkan peserta didik untuk mempraktikkannya.

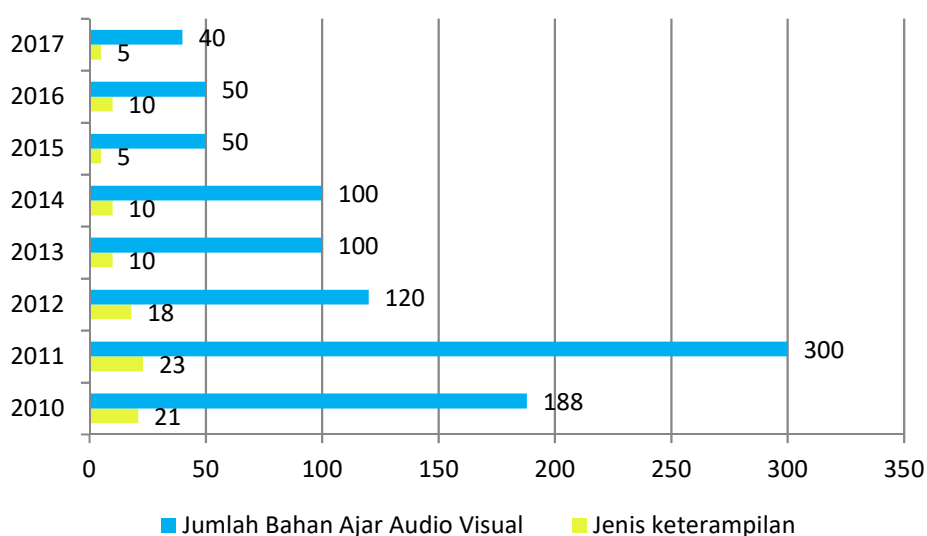
Bahan ajar yang disusun ada 2 jenis, yaitu dalam bentuk audio visual dan bahan ajar cetak. Penyusunan bahan ajar audio visual dilakukan dengan tahapan: penyusunan naskah dan sinopsis substansi, finalisasi naskah dan sinopsis substansi, produksi dan review hasil produksi bahan ajar dalam bentuk audio visual. Penyusunan bahan ajar cetak berupa buku dilakukan dengan tahapan: penyusunan draft bahan ajar, review draft bahan ajar, uji publik draft bahan ajar, dan finalisasi draft bahan ajar.

Pada tahun 2017 telah disusun bahan ajar audio visual sebanyak 40 episode dari 5 jenis keterampilan. Masing-masing jenis ketrampilan disusun dalam 8 episode dalam bentuk reportase, testimony, infografis, Vlog, dan profiling. Untuk tahun 2017 bahan ajar audio visual ini lebih focus pada pendidikan karakter. Adapaun daftar rinci sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 18. Daftar Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2017

No	Jenis Keterampilan	Jumlah
1	Mengemudi kendaraan bermotor	8 episode
2	Spa	8 episode
3	Baby sitter	8 episode
4	Pendidik PAUD	8 episode
5	Pekarya kesehatan	8 episode

Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga 2017 telah disusun sebanyak 948 episode bahan ajar audio visual dari 50 jenis keterampilan, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



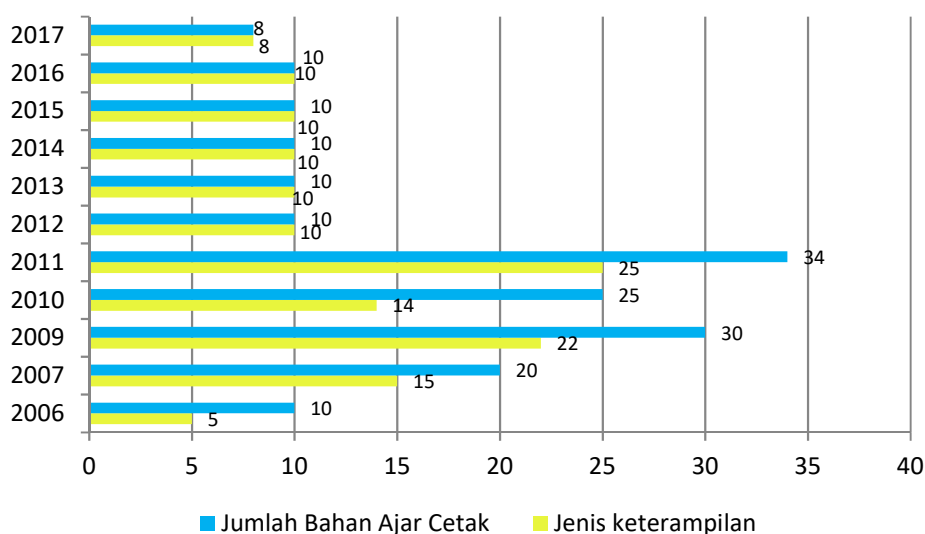
Grafik 3. Jumlah Bahan Ajar Audio Visual Tahun 2010-2017

Sedangkan untuk bahan ajar cetak dalam bentuk buku telah disusun 8 judul keterampilan, yaitu:

Tabel 19. Daftar Bahan Ajar Cetak Tahun 2017

No	Jenis Keterampilan	Jumlah
1	Desain grafis	1 Judul
2	Membatik	1 Judul
3	Web design	1 Judul
4	Plumbing	1 Judul
7	Pramuniaga	1 Judul
8	Teknisi AC	1 Judul
9	Web Programming	1 Judul
10	Teknik kendaraan ringan	1 Judul

Dengan demikian, sejak tahun 2006 hingga 2017 telah disusun sebanyak 177 judul bahan ajar cetak dari 49 jenis keterampilan, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 4. Jumlah Bahan Ajar Cetak Tahun 2006-2017

5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/Mitra yang Memperoleh Penguatan Kelembagaan

Realisasi dari IKK ini adalah 759 lembaga (84,33%) dari target renstra sebanyak 900 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 781 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai 97,18%.

IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan ini ditetapkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan (melalui pameran, pemberian apresiasi/penghargaan, publikasi baik dengan media internet maupun dalam bentuk *leaflet* dan *booklet*) serta penguatan kemitraan dalam bentuk koordinasi dan pemberian bantuan kemitraan baik dengan asosiasi profesi, organisasi mitra, konsorsium, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Ketercapaian IKK ini didukung tiga output, yaitu:

- a. Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja;
- b. Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional;

c. Layanan Internal (Overhead).

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan:

Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan	1. Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	-	-	-	612 lbg	601 lbg	98,20
	2. Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	900 lbg	1.044 lbg	116,00	142 lbg	131 lbg	92,25
	3. Layanan Internal (Overhead): Layanan publikasi dan promosi kursus dan pelatihan	-	-	-	27 lbg	27 lbg	100,00

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. **Output "Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja"** memiliki capaian 98,20% atau 601 lembaga dari target yang ditetapkan sebanyak 612 lembaga. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan ketidakhadiran peserta pada pelaksanaan kegiatan. Pencapaian output tersebut didukung oleh 2 program kegiatan yaitu:

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Manajemen LKP

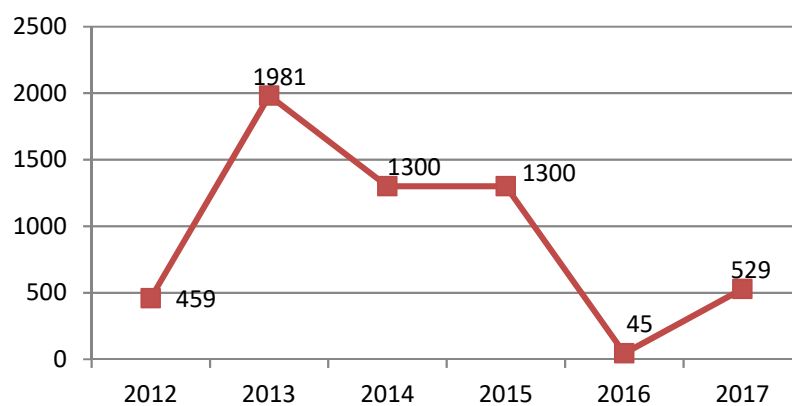
Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua kategori: i) Bimbingan teknis peningkatan mutu manajemen LKP yang bertujuan untuk mempersiapkan LKP menuju akreditasi (sebanyak 3 tahap kegiatan), ii) Bimbingan teknis peningkatan mutu pembelajaran berbasis android (sebanyak 3 tahap kegiatan).

Program ini terdiri atas tiga komponen kegiatan, yaitu: a) Penyusunan modul bimbingan teknis pengelolaan LKP, b) Review modul bimbingan teknis pengelolaan LKP, dan c) Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu manajemen LKP. Penyusunan modul dilakukan melalui penugasan kepada tim yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sedangkan untuk review modul melibatkan beberapa pembahas di luar tim penyusun yang

terdiri dari unsur LSK Pendidik, pamong belajar pada UPT, akademisi dan praktisi untuk mencermati dan memperkaya materi yang telah disusun.

Jumlah realisasi sasaran sebanyak 529 lembaga belum mencapai target sebanyak 540 lembaga, karena pada saat pelaksanaan kegiatan ada beberapa peserta undangan yang tidak dapat hadir atau tidak memenuhi undangan yang sudah dikirimkan oleh Dit. Binsuslat.

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan penguatan manajemen dan pembelajaran LKP sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 berjumlah 5.614 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 5. Jumlah LKP Mendapat Penguatan Manajemen dan Pembelajaran Tahun 2012-2017

2) Anugerah Apresiasi Kompetensi Peserta Didik dan LKP Berprestasi Tingkat



Nasional

Gambar 7. Pemberian Penghargaan Pemenang Peningkatan Mutu LKP Berprestasi dan Kompetensi Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional Tahun 2017 oleh Mendikbud RI

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan anugerah/penghargaan bagi para juara lomba LKP berprestasi dan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tahun 2017 yang mewakili 72 lembaga kursus. Daftar para pemenang apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Pemenang Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	JENIS KETERAMPILAN
I. KATEGORI LKP TERAKREDITASI A/B				
1	PERTAMA	LKP EF English First	Kota Depok, Jawa Barat	Bahasa Inggris
2	KEDUA	LKP Dessy Education	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	Bahasa Inggris
3	KETIGA	LKP Sangkuriang	Kota Bogor, Jawa Barat	Perhotelan/Kapal Pesiar
4	HARAPAN I	LKP LP3I	Kota Surabaya, Jawa Timur	Administrasi Perkantoran
5	HARAPAN II	LKP Quali Internasional	Kota Surabaya, Jawa Timur	Bahasa Inggris
6	HARAPAN III	LKP Mahardika	Kota Cirebon, Jawa Barat	Tata Rias Pengantin
II. KATEGORI LKP TERAKREDITASI C/D				
1	PERTAMA	LKP Piksi Megatama	Kota Bandung, Jawa Barat	Desain Grafis
2	KEDUA	LKP Gazebo English Course	Kab. Trenggalek, Jawa Timur	Bahasa Inggris
3	KETIGA	LKP Nur Fikri	Kab. Ciamis, Jawa Barat	Bahasa Inggris
4	HARAPAN I	LKP Erlangga	Kota Blitar, Jawa Timur	Komputer
5	HARAPAN II	LKP Dynasty	Kab. Trenggalek, Jawa Timur	Komputer
6	HARAPAN III	LKP Gamatika	Kab. Boyolali, Jawa Tengah	Mengemudi

Adapun para pemenang apresiasi kompetensi peserta didik tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Pemenang Peningkatan Mutu Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2017

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN KOTA-PROVINSI
I. BIDANG KETERAMPILAN AKUNTANSI			
1	PERTAMA	Albert Gerraldi	Kota Jakarta Pusat
2	KEDUA	Fernanda Dwi Iswidianggi	Kab. Malang, Jatim
3	KETIGA	Lusia Rini Dwiastuti	Kab. Sleman, DIY
4	HARAPAN I	Surya Firmansyah	Kab. Sidoarjo, Jatim
5	HARAPAN II	Indah Febria	Kota Pariaman, Sumbar
6	HARAPAN III	Diyah Mawarni	Kota Surakarta, Jateng
II. BIDANG KETERAMPILAN HANTARAN			
1	PERTAMA	Endang Setiawati	Kab. Serang, Banten
2	KEDUA	Sumiatun Khasaanah	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3	KETIGA	Kadarwati	Kota Jambi, Jambi
4	HARAPAN I	Feri Hendrawati	Kab. Nganjuk, Jawa Timur
5	HARAPAN II	Sari Pangastuti	Kota Bandar Lampung, Lampung
6	HARAPAN III	Utik Suraningsih	Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
III. BIDANG KETERAMPILAN MEMBATIK			
1	PERTAMA	Nursiyah	Kota Bandar Lampung, Lampung
2	KEDUA	Syamsul Hidayat	Kota Pekalongan, Jawa Tengah
3	KETIGA	Shofa Eliyana	Kota Serang, Banten
4	HARAPAN I	Reni Suprihatin	Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
5	HARAPAN II	Umi Kulsum	Kab. Jombang, Jawa Timur
6	HARAPAN III	Nurul Fadzillah	Kota Banda Aceh, Aceh
IV. BIDANG KETERAMPILAN KOMPUTER			
1	PERTAMA	Ainal Mafar	Kab. Aceh Besar, Aceh
2	KEDUA	Pameldo Abdul Aziz	Kota Bengkulu, Bengkulu
3	KETIGA	Gede Suartawan	Kota Denpasar, Bali
4	HARAPAN I	Jalil Aziz Zulfatih	Kab. Banyumas, Jawa Tengah
5	HARAPAN II	Ade Rio Ambayu	Kota Medan, Sumatera Utara
6	HARAPAN III	Iqbal Maulana Ikhsan	Kota Surakarta, Jawa Tengah
V. BIDANG KETERAMPILAN SPA			
1	PERTAMA	Mela Puspa Asri	Kota Jogjakarta, DIY
2	KEDUA	Oki Ria Anggraini	Kab. Sidoarjo, Jatim
3	KETIGA	Nike Noviana	Kota Jakarta Utara
4	HARAPAN I	Rini S Priani	Kota Bogor, Jabar
5	HARAPAN II	Maulidina Anggi Dwi P.	Kab. Pati, Jateng
6	HARAPAN III	Rada Dwi Angguna	Kota Samarinda, Kaltim
VI. BIDANG KETERAMPILAN TATA BOGA			
1	PERTAMA	Fitri Pujiasih	Kota Jakarta Pusat
2	KEDUA	Efriyanti	Kota Bandar Lampung
3	KETIGA	Eli Juliati	Kota Medan, Sumut
4	HARAPAN I	Muhamad As'aad Suseno	Kota Bogor, Jabar
5	HARAPAN II	Ade Rizky Syahputra	Kota Padang, Sumbar

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN KOTA-PROVINSI
6	HARAPAN III	Akdia Fiva Morita	Kota Kupang, NTT
VII. BIDANG KETERAMPILAN TATA BUSANA			
1	PERTAMA	Suryanti	Kota Semarang, Jateng
2	KEDUA	Grace Novilicia	Kota Makassar, Sulsel
3	KETIGA	Putri Anjarwati	Kab. Jombang, Jatim
4	HARAPAN I	Anti	Kota Palangkaraya, Kalteng
5	HARAPAN II	Safitri Listyaningrum	Kab. Sleman, DIY
6	HARAPAN III	Sri Defi	Kab. Serang, Banten
VIII. BIDANG KETERAMPILAN TATA RIAS PENGANTIN			
1	PERTAMA	Mamuk Rohmadona	Kab. Bantul, DIY
2	KEDUA	Nyi Mas Aprilia	Kota Bogor, Jabar
3	KETIGA	Rizki Febrianti	Kota Samarinda, Kaltim
4	HARAPAN I	Sendi Rachmar Priyadi	Kota Jakarta Barat
5	HARAPAN II	Miranda Meutia	Kota Medan, Sumut
6	HARAPAN III	Sri Hanisa	Kab. Banjar, Kalsel
IX. BIDANG KETERAMPILAN TATA KECANTIKAN			
1	PERTAMA	Dwi Purnama	Kab. Bantul, DIY
2	KEDUA	I Dewa Ayu Purwaningsih	Kota Denpasar, Bali
3	KETIGA	Kezia Putri Herawati	Kota Salatiga, Jateng
4	HARAPAN I	Ari Suharto	Kota Bandar Lampung
5	HARAPAN II	Dut Felia	Kota Banda Aceh, Aceh
6	HARAPAN III	Namira Alsa Haq	Kota Jambi
X. BIDANG KETERAMPILAN OTOMOTIF			
1	PERTAMA	Mauliza	Kab. Aceh Besar, Aceh
2	KEDUA	Abdul Karim	Kota Banjarmasin, Kalsel
3	KETIGA	Dudan Nurjaman	Kab. Cianjur, Jabar
4	HARAPAN I	Andhika Hari Setiawan	Kab. Gunungkidul, DIY
5	HARAPAN II	Filipus Tomi Dewantoro	Kab. Lampung Selatan, Lampung
6	HARAPAN III	Dicky Iswahyudi	Kota Bontang, Kaltim

Selain dua kegiatan diatas, capaian lainnya dari output ini adalah tersusunnya Panduan Pendidikan Karakter pada LKP yang telah direview bersama dengan staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter, Dr. Arie Budiman, M.Si.

- b. *Output "Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional"* memiliki capaian 92,25% atau 131 lembaga dari 142 lembaga yang ditargetkan. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan ketidakhadiran peserta pada pelaksanaan kegiatan. Pencapaian output ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:
- 1) Bantuan Pembinaan Organisasi Mitra

Dana bantuan ini diperuntukan bagi 20 lembaga/organisasi di bidang kursus dan pelatihan dengan capaian fisik sebesar 100,00%. Bantuan Pembinaan bagi Organisasi Mitra (BP Ormit) adalah pemberian bantuan dari pemerintah secara hibah kepada Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi/Konsorsium Kursus untuk program penguatan manajerial dan kapasitas organisasi yang terkait dengan program-program pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan. Program bantuan ini terdiri atas 3 komponen, yaitu: a) bantuan operasional bagi Ormit; b) penilaian proposal BP Ormit; c) rapat koordinasi program kemitraan kursus dan pelatihan; d) review juknis program kelembagaan dan kemitraan.

2) Peningkatan Mutu Mitra Kursus dan Pelatihan

Kegiatan ini diikuti oleh 60 lembaga mitra kursus dan pelatihan yang berasal dari organisasi mitra, konsorsium dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi, yang dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan program kursus dan pelatihan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang dapat disinergikan dengan program masing-masing mitra kursus dan pelatihan.



Gambar 8. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu diikuti oleh Mitra-Mitra Kursus dan Pelatihan

3) Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional

Terdapat 10 bidang yang dilombakan dengan kategori yang dikelompokkan dalam bidang-bidang berikut: Bidang keterampilan Akuntansi, Hantaran, Membatik; Komputer; Spa; Tata Boga; Tata Busana; Tata Rias Pengantin; Tata



Kecantikan; dan Otomotif.

Gambar 9. Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Bidang Tata Boga dan Tata Rias Pengantin

Dana bantuan ini diperuntukan bagi 10 organisasi mitra penyelenggara lomba kompetensi peserta didik tahun 2017, meliputi: a) Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI); b) Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi Indonesia (APTASI); c) Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (APLIKASI); d) Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) Pancawati; e) Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati; f) Persatuan Ahli Kecantikan Indonesia (PAKI) Tiara Kusuma; g) Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA); h) Asosiasi Profesi Teknik Otomotif (APTO); i) Asosiasi Profesi Batik-Tenun Nusantara (APBTN) Bhuwana; j) Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI) Kartini.

Program ini didukung oleh kegiatan Presentasi Calon Penyelenggara Peningkatan Mutu Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional dan pelaksanaan peningkatan mutu peserta didik berprestasi tingkat nasional, dengan melibatkan juri dari unsur akademisi, praktisi, dan asosiasi profesi terkait.

4) Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan adanya lembaga-lembaga berprestasi baik di forum nasional maupun internasional yang benar benar

terpercaya dan berkualitas dari masing masing kategori. Melalui pelaksanaan apresiasi ini juga diharapkan adanya peningkatan daya saing lembaga sekaligus mampu mereduksi perbedaan kualitas dan kuantitas antara lembaga kursus dan pelatihan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sehingga pada akhirnya akan tampak adanya sejumlah LKP yang berkinerja lebih baik.

Program ini didukung dengan kegiatan: i) Penyusunan Instrumen Penilaian Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional, ii) penilaian proposal peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, iii) verifikasi peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, iv) Presentasi Nominasi Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional, v) Evaluasi pelaksanaan program apresiasi LKP tingkat nasional.

Presentasi nominasi dilakukan oleh 21 lembaga (15 lembaga kategori terakreditasi A/B, dan 6 lembaga kategori terakreditasi C/D) yang telah diverifikasi lapangan dan mendapatkan nilai yang melampaui passing grade yang telah ditetapkan sesuai dengan kuota anggaran yang ada.



Gambar 10. Presentasi Nominasi Peningkatan Mutu LKP Berprestasi Tingkat Nasional

5) Kemitraan dengan konsorsium kursus dan pelatihan

Terdapat 19 konsorsium yang menjadi mitra Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan program kerja masing-masing. Selain itu juga dilakukan pengembangan kemitraan LKP dengan DUDI berupa kunjungan ke DUDI untuk mendapatkan

data dan informasi tentang kompetensi dan kriteria yang dipersyaratkan oleh DUDI dalam merekrut karyawan atau menerima peserta magang dari LKP serta peluang kerjasama yang bisa dilakukan antara DUDI dan LKP.

- c. **Output "Layanan Internal (Overhead)"** memiliki capaian 100,00%. Pencapaian output tersebut didukung kegiatan fasilitasi promosi layanan kursus dan pelatihan berupa pameran kursus dan pelatihan yang diikuti oleh 27 lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan. Pameran merupakan salah satu cara yang efektif karena melibatkan ribuan orang dalam satu tempat pada waktu yang sama. Keterlibatan banyak orang menjadikan informasi tentang kebijakan direktorat dan program-program kursus yang diwakili oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan, PP-PAUD dan Dikmas, PKBM, LSK, SMK dan DUDI dapat tersebar dengan cepat dan tepat sasaran.

6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional

Realisasi dari IKK ini adalah 32 naskah (640,00%), melebihi target renstra sebanyak 5 naskah. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 31 naskah maka realisasi IKK ini mencapai 103,23%. Capaian ini dapat melebihi target dengan strategi merubah lokasi kegiatan yang semula direncanakan di luar Jakarta dengan menggunakan pesawat udara menjadi di luar Jakarta dengan menggunakan perjalanan darat setelah dilakukan analisis terhadap tim penyusun yang sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga dilakukan dalam hal optimalisasi tenaga-tenaga ahli, baik praktisi maupun akademisi, dalam menyusun draft kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dimana pada perencanaan awal dialokasikan 7 orang untuk menyusun masing-masing jenis SKL, namun setelah dianalisa pada saat pelaksanaan program ditetapkan bahwa setiap jenis SKL dapat disusun oleh 6 orang saja.

IKK jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional ini ditetapkan sebagai bahan acuan dari berbagai pihak untuk menyusun standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis KKNi yang dapat diterapkan di lembaga kursus dan pelatihan, sehingga hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lapangan usaha dan dunia industri.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh output yaitu "Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan". Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional:

Tabel 23. Capaian IKK 6 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	1) Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan	4 naskah	17 naskah	425	31 naskah	32 naskah	103,23

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan tahun 2017 melampaui target sebesar 103,23% atau 32 naskah dari 31 naskah yang ditargetkan. Ketercapaian output tersebut didukung oleh 2 program kegiatan yaitu:

1) Penyusunan dan finalisasi Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. SKL disusun sebagai acuan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dan juga sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. SKL disusun dengan tujuan: i) sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri, dan ii) sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.

Berdasarkan tujuan tersebut maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyusun SKL yang berbasis KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tahun 2017 Ditbinsuslat telah menyusun 16 SKL dari jenis pendidikan keterampilan yang berbeda yaitu: (a) Teknisi HP; (b) Elektronika Industri Pengendali logika terprogram ; (c) Perakitan Pipa Bahan Logam, (d) Operator Alat Berat Tingkat Pemula; (e) Pijat Akupresur; (f) Penyutradaraan Televisi; (g) Penyiar Radio; (h) Instruktur Tari Tradisional; (i) Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan; (j) Jurnalistik; (k) Desain Interior; (l) Multimedia

Tingkat Pemula, (m) Keamanan Komputer (IT Security); (n) Awak Kabin Pesawat Udara; (o) Tata Operasi Pesawat Udara; dan (p) Pijat Urut Tradisional.

Prosedur penyusunan SKL terdiri dari 5 tahap yaitu: a) Penyusunan draf SKL, b) Review SKL, c) Penyusunan Instrumen, d) Validasi SKL, dan e) Finalisasi SKL. Selanjutnya draft akan direkomendasikan untuk ditetapkan melalui Permendikbud.



Gambar 11. Review Standar Kompetensi Lulusan melibatkan Pakar Praktisi dan Akademisi terkait

2) Penyusunan dan finalisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKL berbasis KKNI. Kurikulum sebagai acuan bagi LKP dalam proses belajar mengajar. Prosedur penyusunan KBK terdiri dari 5 tahap yaitu: a) Penyusunan draf KBK, b) Review KBK, c) Penyusunan Instrumen, d) Validasi KBK, dan e) Finalisasi KBK. Selanjutnya draft akan direkomendasikan untuk ditetapkan melalui Permendikbud.

Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2017 telah dilaksanakan untuk 16 jenis pendidikan keterampilan yaitu: (a) Teknisi HP; (b) Elektronika Industri Pengendali logika terprogram ; (c) Perakitan Pipa Bahan Logam, (d) Operator Alat Berat Tingkat Pemula; (e) Pijat Akupresur; (f) Penyutradaraan

Televisi; (g) Penyiar Radio; (h) Instruktur Tari Tradisional; (i) Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan; (j) Jurnalistik; (k) Desain Interior; (l) Multimedia Tingkat Pemula, (m) Keamanan Komputer (IT Security); (n) Awak Kabin Pesawat Udara; (o) Tata Operasi Pesawat Udara; dan (p) Pijat Urut Tradisional.

7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang Dibentuk dan Dibina

Realisasi dari IKK ini adalah 67 lembaga, jika ditambah dengan capaian tahun 2016 menjadi sebanyak 225 lembaga (64,29%) dari target renstra sebanyak 350 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 67 lembaga maka realisasi IKK ini mencapai target 100,00%.

IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Terkait dengan hal tersebut diatas maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas untuk menyiapkan perangkat terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik, antara lain membentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), master penguji dan penguji uji kompetensi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina:

Tabel 24. Capaian IKK 7 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja	Output	Tahun 2016	Tahun 2017
-------------------	--------	------------	------------

Kegiatan		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	1. Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	158 Lembaga	158 lembaga	100	67 Lembaga	67 lembaga	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output "TUK yang terbentuk" memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 67 lembaga.

Terdapat 65 Tempat uji kompetensi (TUK) yang terbentuk tahun 2017. TUK adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) berdasarkan penilaian dan kelayakan. Pembentukan TUK bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk membantu kesiapan TUK menyelenggarakan uji kompetensi sehingga uji kompetensi bisa berjalan dengan optimal maka Direktorat memandang penting untuk memberikan bantuan penguatan kelembagaan TUK.

Selain TUK yang dibentuk, ketercapaian output ini juga didukung oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terbentuk sebanyak 2 LSK sesuai target, yaitu LSK Teknik Sepeda Motor dan Akupresur. LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus serta masyarakat yang belajar mandiri. Bentuk organisasi LSK adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah (Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud), organisasi profesi pembentuknya dan masyarakat (peserta uji kompetensi).

8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi

Realisasi dari IKK ini adalah 46.236 orang (33,03%) dari target renstra sebanyak 140.000 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 45.066 orang maka realisasi IKK ini mencapai target 102,60% (46.236 orang). Realisasi ini

merupakan akumulasi dari beasiswa uji kompetensi dari pemerintah sebesar 14.381 orang dan beasiswa uji kompetensi dari pemerintah terintegrasi dengan program PKK sebesar 31.855 orang, sehingga total capaian 46.236 orang. Walaupun melebihi target, namun capaian tersebut belum dapat memfasilitasi uji kompetensi bagi seluruh penerima bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

IKK Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi ini ditetapkan karena tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) keterbatasan kemampuan ekonomi peserta didik; dan (2) biaya uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau



mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi. Pemberian bantuan biaya uji kompetensi untuk peserta didik lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri adalah untuk: (1) membantu peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kompetensi, (2) meningkatkan motivasi dan peran lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan.

Gambar 12. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Tata Kecantikan Kulit

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi:

Tabel 25. Capaian IKK 8 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi	1. Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	80.500 orang	87.749 Orang	109,00	45.066 orang	46.236 Orang	102,60

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output "Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja" melampaui target yang ditetapkan sebesar 102,60%. Hal ini dikarenakan dimungkinkan karena terdapat beberapa jenis keterampilan yang memiliki standar biaya uji kompetensi lebih rendah dari satuan bantuan uji kompetensi yang dialokasikan sehingga dana yang tersisa dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah peserta uji kompetensi.

Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang belajar di LKP maupun yang belajar mandiri. Bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi tidak dapat mengikuti uji kompetensi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyediakan anggaran bantuan biaya uji kompetensi untuk membantu peserta didik tersebut agar bisa mengikuti uji kompetensi.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan berikut: 1) Pelaksanaan penilaian dan verifikasi bantuan penyelenggaraan UJK peserta didik; 2) Harmonisasi sertifikasi

kompetensi dengan BNSP; 3) Pelaksanaan review juknis banper uji kompetensi; 4) Pendampingan Pelaksanaan Uji Kompetensi; dan 5) Bimbingan Teknis Uji Kompetensi.

9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis

Realisasi dari IKK ini adalah 474 lembaga (46,38%), kurang dari target renstra sebanyak 1.022 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 512 lembaga maka realisasi IKK ini sebesar 92,58%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan membengkaknya satuan biaya perjalanan untuk beberapa wilayah dibandingkan alokasi yang tersedia sehingga harus mengurangi jumlah peserta.

IKK "Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis" ditetapkan sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh dua output yaitu:

- a. Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja;
- b. Layanan Internal (Overhead).

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK "Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis":

Tabel 26. Capaian IKK 9 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis	1. Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja	500 lembaga	180 lembaga	36,00	480 lembaga	447 lembaga	93,13
	2. Layanan Internal (Overhead)	-	-	-	32 Lembaga	27 Lembaga	84,38

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. **Output "Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja"** kurang memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 93,13% atau 447 lembaga.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan bimbingan teknis dan sertifikasi instruktur kursus yang mensosialisasikan 16 jenis SKL dan KBK yang telah disusun, yaitu: (a) Teknisi HP; (b) Elektronika Industri Pengendali logika terprogram ;

(c) Perakitan Pipa Bahan Logam, (d) Operator Alat Berat Tingkat Pemula; (e) Pijat Akupresur; (f) Penyutradaraan Televisi; (g) Penyiar Radio; (h) Instruktur Tari Tradisional; (i) Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan; (j) Jurnalistik; (k) Desain Interior; (l) Multimedia Tingkat Pemula, (m) Keamanan Komputer (IT Security); (n) Awak Kabin Pesawat Udara; (o) Tata Operasi Pesawat Udara; dan (p) Pijat Urut Tradisional.

- b. **Output "Layanan Internal (Overhead)"** kurang memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 84,38% atau 27 lembaga.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan fasilitasi dukungan Gerakan Indonesia Kompeten yang diintegrasikan dengan pameran kursus dan pelatihan yang diikuti oleh 27 lembaga/stand.



Gambar 13. Pameran Kursus & Pelatihan dalam rangka Gerakan Indonesia Kompeten

10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Divalidasi

Realisasi dari IKK ini adalah 13.101 lembaga (252,23%) dari target renstra sebanyak 5.194 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 2.000 lembaga maka realisasi IKK ini melebihi target sebesar 655,05%.

IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi ini ditetapkan dengan tujuan untuk terjaminnya siklus pendataan LKP secara berkala dengan konsep kemandirian yang berkesinambungan terhadap data LKP yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) maupun LKP yang akan mengajukan NPSN

baru, serta membangun sinergisitas dalam pengelolaan data LKP antara pusat dengan daerah dan di pusat dengan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Validasi LKP tahun 2017 ini dilakukan secara lebih sistematis dalam rangka mensinkronkan data LKP (yang memiliki NPSN) pada aplikasi DAPODIK yang diintegrasikan dari data NILEK pada tahun sebelumnya..

Pelaksanaan pendataan dan validasi data bekerjasama antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Dinas Pendidikan Kab/kota. Pada tahun 2017, pelaksanaan validasi data dilakukan melalui operator DAPODIK kabupaten/kota.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan berstandar nasional. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi:

Tabel 27. Capaian IKK 10 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional	1.000 lembaga	1.039 lembaga	103,90	2.000 lembaga	13.101 lembaga	655,05

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa: Output "Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional" melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 655,05% atau 13.101 lembaga dari 2.000 lembaga yang ditargetkan. Realisasi tahun 2017 ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, hal ini dimungkinkan dengan dilakukannya validasi melalui operator DAPODIK di kabupaten/kota. Realisasi dari IKK ini tinggi karena adanya perubahan arah kebijakan pentingnya Data LKP di DAPODIK dalam penentuan keputusan baik program maupun bantuan sehingga mempengaruhi desain kegiatan. Pada awal desain kegiatan validasi akan dilakukan terhadap kabupaten/kota dengan kriteria yang terbanyak jumlah LKP nya dan hanya dilakukan 1 kegiatan. Tetapi dengan mempertimbangkan target sasaran yang harus secepatnya terselesaikan untuk divalidasi, maka desain dirubah menjadi per wilayah/per provinsi dengan analisa akan terjadi efisiensi anggaran perjalanan dinasnya, sehingga sasaran lebih banyak. Hasilnya kegiatan validasi LKP terintegrasi DAPODIK dapat dilakukan di 11 provinsi yang terbanyak LKP nya dengan transpor lokal sehingga perjalanan dinas lebih efisien karena kegiatan dilakukan di provinsi tersebut, yaitu Jawa

Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Pencapaian output tersebut didukung oleh kegiatan: i) Pendayagunaan data lembaga kursus integrasi dengan DAPODIK, dan ii) Validasi pengembangan model kursus dan pelatihan.

11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap di Akreditasi

Pada tahun 2017, IKK ini tidak lagi menjadi tupoksi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, melainkan tupoksi UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas. Dalam hal ini, anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas.

12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi

Realisasi dari IKK ini adalah 180 orang, jika ditambahkan dengan capaian tahun 2016 menjadi 374 orang (180,78%), melebihi target renstra yang ditetapkan sebanyak 350 orang. Sedangkan jika diukur berdasarkan target output dalam RKA-KL sebanyak 140 orang maka realisasi mencapai 128,57% atau 180 orang.

IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Untuk itu ada 4 perangkat yang harus disiapkan yaitu LSK, TUK, Master penguji dan penguji. Dari uraian

diatas jelas bahwa peran master penguji dan penguji uji kompetensi adalah sangat penting dalam pelaksanaan uji kompetensi. Master penguji adalah *expert* yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi master penguji kursus dan pelatihan. Master penguji ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sedangkan penguji adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.

Ketercapaian IKK ini dilihat melalui satu output, yaitu Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi:

Tabel 28. Capaian IKK 12 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	1. Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional	175 orang	194 orang	110,86	140 orang	180 orang	128,57

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi” ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 140 orang dengan tingkat realisasi 128,57% atau 180 orang. Strategi pencapaian realisasi yang melebihi target dilakukan dengan penentuan lokasi kegiatan yang didekatkan dengan daerah asal calon master penguji maupun calon penguji uji kompetensi terbanyak, sehingga secara tidak langsung anggaran perjalanan dinas dapat diefisiensikan sementara kuantitas dari calon master penguji maupun calon penguji uji kompetensi bertambah.

Pencapaian output ini didukung oleh kegiatan Pelatihan dan sertifikasi penguji uji kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Master Penguji Uji Kompetensi sehingga kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai nara sumber dalam pelatihan penguji uji kompetensi. Peran master penguji sangat penting yaitu untuk menghasilkan Penguji Uji Kompetensi yang *qualified* dan *certified*, mulai dari proses seleksi, pelatihan serta Uji Kompetensi terhadap calon

Penguji Uji Kompetensi. Untuk melahirkan penguji Uji Kompetensi diperlukan Master Penguji yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi pula.

13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Realisasi dari IKK ini adalah 1.000 orang, jika ditambahkan dengan capaian tahun 2016 menjadi 2.030 orang (6,77%), dari target renstra sebanyak 30.000 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 1.000 orang maka realisasi IKK ini mencapai 100,00%.



Gambar 14. Orientasi Teknis Pemagangan Peserta Didik Kursus dan Pelatihan

IKK Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) ini ditetapkan dalam rangka memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik kursus dan pelatihan sebelum memasuki dunia kerja. IKK ini baru dilaksanakan sejak tahun 2016.

Proses magang dilaksanakan antara 3 sampai 6 bulan di perusahaan industri, yang didahului dengan pendalaman materi serta pembekalan mental untuk persiapan memasuki dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan. Sasaran IKK ini adalah warga

masyarakat yang sudah memiliki keterampilan terkait atau ingin meningkatkan kompetensinya agar dapat menaikkan jenjang karirnya.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI):

Tabel 29. Capaian IKK 13 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja	1.000 Orang	1.030 orang	103,00	1.000 orang	1.000 orang	100,00

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output "Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja" ini mencapai target sebesar 100,00% atau 1.000 orang. Pencapaian output ini didukung oleh 3 program kegiatan yaitu:

- a) Penilaian proposal pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan
Kegiatan penilaian dilakukan untuk menyeleksi proposal program magang peserta didik berdasarkan kesesuaian keterampilan yang diselenggarakan LKP dengan kebutuhan kompetensi di industri pasangannya.
- b) Verifikasi proposal pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan
Verifikasi dilakukan ke lembaga calon penyelenggara program magang yang telah lolos penilaian substansi serta DUDI pasangannya untuk melihat secara langsung kesiapan lembaga dan perusahaan calon tempat magang dalam melaksanakan program magang peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahap kegiatan dengan sasaran unsur LKP dan DUDI pasangannya: Tahap I sebanyak 40 lembaga yang tersebar di 23 kabupaten/Kota pada 3 Provinsi, sedangkan tahap II sebanyak 30 lembaga berada di 24 Kabupaten/Kota pada 10 Provinsi.
- c) Orientasi teknis pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan
Kegiatan orientasi teknis program magang ini diikuti oleh 70 lembaga calon penyelenggara program magang dan DUDI pasangannya yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang program dan mekanisme pelaksanaan, penyusunan

RAB, laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

d) Supervisi pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan

Supervisi dilakukan ke lembaga penyelenggara program magang yang sedang dalam proses pemagangan. Kegiatan ini dilakukan dalam satu tahap dengan sasaran unsur LKP dan DUDI pasangannya sebanyak 36 lembaga yang tersebar di 12 kabupaten/kota pada 2 provinsi.

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Realisasi dari IKK ini adalah 3 dokumen (150%), melebihi target renstra sebanyak 2 dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 3 dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

IKK "Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana" ini ditetapkan dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Layanan internal (overhead). Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana:

Tabel 30. Capaian IKK 14 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Layanan internal (overhead)	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 3 dokumen.

Output ini didukung oleh beberapa program kegiatan, antara lain:

1) Penyusunan rencana program dan anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kursus dan pelatihan diperlukan adanya penyusunan rencana kegiatan maupun anggaran.

Perencanaan ini merupakan kegiatan yang paling mendasar, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dalam penggunaan sumber daya. Hasil kegiatan ini adalah RKA-KL, Program Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat.

Perencanaan program dan anggaran ini dilaksanakan dalam beberapa kali penyusunan dan revisi, mengingat sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal dan Kementerian sering terjadi perubahan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program ini adalah perubahan perencanaan yang waktunya sangat sempit sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi dengan tim penyusun dari masing-masing subdit dan subbag tata usaha. Hal ini berakibat pada perencanaan yang kurang matang meskipun secara pelaksanaan nantinya bisa dilakukan.

2) Pengelolaan data dan informasi

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan berikut: i) Pelatihan pengelola data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan, ii) Perumusan rencana strategis pengelolaan data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan, dan iii) Penyusunan Best Practice Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Pelatihan Pengelola Data dilaksanakan dalam 6 Tahap Kegiatan yaitu di Bandung, Semarang, Makasar, Surabaya, Medan, Palembang. Peserta kegiatan ini adalah operator dapodik di dinas pendidikan kabupaten kota setempat dengan tujuan untuk mendorong pendataan lembaga kursus dan pelatihan pada aplikasi DAPODIK. Hingga pelaksanaan kegiatan terakhir penginputan pada aplikasi dapodik baru mencapai sekitar 6 % dari total jumlah LKP yang aktif dan masih terus berjalan hingga saat ini. Pemantauan proses penginputan data beserta upaya untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan, dikomunikasikan segera melalui grup media sosial yang beranggotakan seluruh operator dapodik peserta kegiatan dan juga para narasumber teknis yang dapat membantu memberikan solusi saat ditemui masalah di lapangan.

Hasil kegiatan ini adalah Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 2015-2019 dan naskah best practice kursus dan pelatihan.

3) Penyusunan laporan dan evaluasi

Berbagai kebijakan dan program kursus dan pelatihan senantiasa dilakukan evaluasi sebagai bahan acuan perbaikan pelaksanaan program-program selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan program kursus dan pelatihan dilakukan untuk memantau pelaksanaan program serta melakukan pendampingan kewirausahaan terhadap penyelenggara dan rintisan usaha program PKW serta untuk melihat apakah bantuan tersebut sudah tepat persyaratannya, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya, serta memastikan berjalannya proses pendampingan lembaga kepada peserta didik.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada tengah dan akhir tahun disusun LAKIP Direktorat.

15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN

Realisasi dari IKK ini adalah 14 dokumen (350%), melebihi target renstra sebanyak 4 dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 14 dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%.

IKK Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas. Realisasi dari IKK ini adalah 100% atau 14 dokumen sudah tercapai.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh dua output:

- a. Layanan internal (overhead);
- b. Layanan Perkantoran.

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN:

Tabel 31. Capaian IKK 15 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN	1. Layanan Internal (overhead)	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	100
	2. Layanan Perkantoran	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. *Output "Layanan internal (overhead)"* telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 13 dokumen.

Output ini didukung oleh beberapa program kegiatan berikut:

1) Pengelolaan Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri dari: review beban kerja pegawai (PBK), penyusunan SOP, review standar kompetensi manajerial (SKM), penyusunan program kerja Reformasi Birokrasi Internal (RBI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), review SKP, tim RBI Direktorat, serta verifikasi, validasi dan input data kepegawaian berbasis online.

2) Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari: penyusunan laporan keuangan, evaluasi target dan penyerapan anggaran, review pemetaan resiko pengelolaan keuangan, tindak lanjut temuan hasil audit dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah 2016, dan penyusunan CaLK serta CR BMN.

3) Pengelolaan Ketatausahaan

Kegiatan ini terdiri dari: penyusunan laporan BMN dan barang persediaan dan pengelolaan arsip Direktorat.

16. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Realisasi dari IKK ini adalah 2 unit (200%), dari target renstra sebanyak 1 unit. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 2 unit maka IKK ini terealisasi sebesar 100,00%.

IKK Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas. Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu: Layanan Perkantoran.

Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran:

Tabel 32. Capaian IKK 16 Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Peralatan dan fasilitas	1. Layanan Perkantoran	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output “Layanan Perkantoran” telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 2 unit peralatan dan fasilitasi perkantoran. Ketercapaian output ini didukung oleh 3 program kegiatan berikut:

a. Layanan Perkantoran

Kegiatan ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk membiayai: operasional pimpinan dan perkantoran serta pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai selama 1 tahun, dan pembayaran gaji ke-13 sebagaimana daftar pegawai di atas.

b. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Kegiatan ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk membiayai: pemeliharaan website (sewa hosting), pemeliharaan perangkat jaringan komputer yaitu pemasangan fiber optik, pemeliharaan koneksi internet, pembelian PC, printer dan peralatan sejenisnya.

c. Gedung/Bangunan

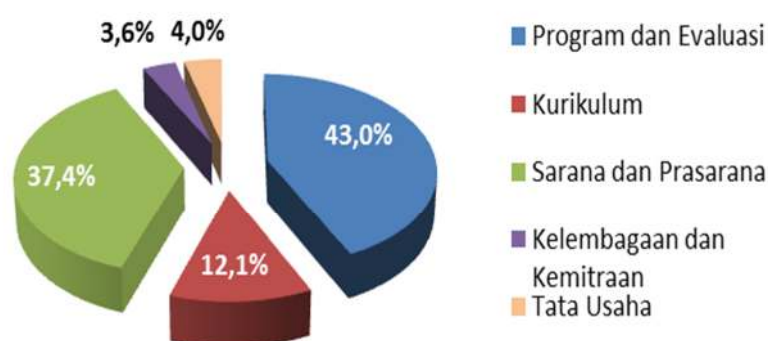
Kegiatan ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan program rutin untuk memfasilitasi perawatan gedung/bangunan.

17. Kendaraan Operasional Perkantoran

IKK ini tidak terealisasi karena diblokirnya anggaran tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Pagu akhir belanja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA Tahun 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2017 sebesar Rp. 279.275.806.000. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai empat program yang ada di subdit dan satu sub bagian tata usaha yang ada di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan guna mendukung 14 IKK utama dan 3 IKK pendukung.



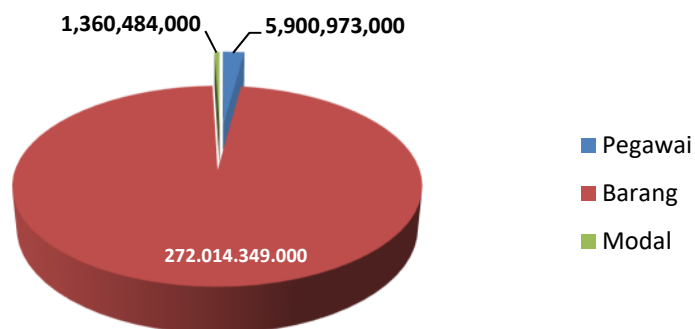
Grafik 6. Persentase Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2017

Berikut pengalokasian anggaran tahun 2017 pada empat program yang ada di subdit dan satu sub bagian tata usaha yang ada di direktorat:

Tabel 33. Pembagian Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Tahun 2017

Nama Subdit/Subbag	PAGU
Program dan Evaluasi	120.045.324.000
Kurikulum	33.726.662.000
Sarana dan Prasarana	104.347.067.000
Kelembagaan dan Kemitraan	9.922.304.000
Tata Usaha	11.234.449.000
Total	279.275.806.000

Sedangkan untuk sebaran anggaran dari PAGU yang ditetapkan per belanja bahan adalah sebagai berikut:



Grafik 7. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis

Anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2017 sebesar Rp 279.275.806.000 yang tersebar ke empat subdirektorat dan satu subbag tata usaha di atas digunakan untuk membiayai empat belas IKK utama dan tiga IKK pendukung serta 4 output kursus dan pelatihan.

Tabel 34. Alokasi Anggaran Dit. Binsuslat Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Pegawai	5.900.973.000
2	Barang	272.014.349.000
3	Modal	1.360.484.000
4	Bansos	-
TOTAL		279.275.806.000

Dari pagu anggaran Rp. 279.275.806.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan, setelah proses rekonsiliasi keuangan yang dilakukan antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bersama dengan KPPN berhasil terserap sebesar Rp. 277.253.357.726 sehingga persentase daya serap anggaran Kemendikbud hingga Bulan Desember 2017 adalah sebesar 99,28%. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp. 344.401.829.000, maka pagu anggaran tahun 2017 ini berkurang sebesar Rp. 65.126.023.000. Dengan berkurangnya anggaran 2017 ini menuntut usaha yang lebih keras lagi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk lebih meningkatkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia, anggaran, material serta mitra kursus dan pelatihan dalam rangka pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan.

Berikut realisasi kinerja keuangan berdasarkan jenis belanja di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dari Biro Keuangan:

Tabel 35. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (000)	Realisasi (000)	%
1	Pegawai	5.900.973.000	4.410.177.849	74,74
2	Barang	272.014.349.000	271.811.869.877	99,93
3	Modal	1.360.484.000	1.031.310.000	75,80
4	Bansos	-	-	-
TOTAL		279.275.806.000	277.253.357.726	99,28

Dan berikut realisasi kinerja keuangan pada empat belas IKK utama dan tiga IKK pendukung serta 4 Output di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dari Biro Keuangan:

Tabel 36. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK dan Output

No	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%
1	[2015] Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	279.275.806.000	277.253.357.726	99,28
1.1	[2015.001] Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	127.618.489.000	127.550.919.600	99,95
1.2	[2015.002] Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	116.254.890.000	116.233.822.100	99,98
1.3	[2015.003] Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional	13.833.504.000	13.801.990.761	99,77
1.4	[2015.004] Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan	6.339.733.000	6.209.566.000	97,95
1.5	[2015.951] Layanan Internal (Overhead)	6.194.097.000	5.918.034.400	95,54

No	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%
1.6	[2015.994] Layanan Perkantoran	9.035.093.000	7.539.024.865	83,44

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja, dari pagu anggaran sebesar Rp. 94.183.567.000 telah terealisasi sebesar Rp. 94.164.305.500 dengan persentase sebesar 99,98%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja, yang terdiri dari bantuan pemerintah PKK dan manajemen. Bantuan pemerintah PKK terserap 100%, sedangkan manajemen tidak terserap 100% disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha, dari pagu anggaran sebesar Rp 116.254.890.000 telah terealisasi sebesar Rp 116.233.822.100 dengan persentase sebesar 99,98%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha, yang terdiri dari bantuan pemerintah PKW dan manajemen. Bantuan pemerintah PKW terserap 100%, sedangkan manajemen tidak terserap 100% disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan, dari pagu anggaran sebesar Rp 6.877.475.000 telah terealisasi sebesar Rp 6.868.933.500 dengan persentase sebesar 99,88%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Output ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan, dari pagu anggaran sebesar Rp 3.224.715.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.106.170.000 dengan persentase sebesar 96,32%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan. Output ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.753.839.000 telah terealisasi sebesar Rp. 6.739.833.964 dengan persentase sebesar 99,79%. IKK ini didukung oleh 3 output yaitu:

- a. Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.704.204.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.697.370.753 dengan persentase sebesar 99,75%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - b. Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.095.125.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.090.693.211 dengan persentase sebesar 99,86%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - c. Layanan Internal (Overhead), dari pagu anggaran sebesar Rp. 954.510.000 telah terealisasi sebesar Rp. 951.770.000 atau sebesar 99,71%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.115.018.000, telah terealisasi sebesar Rp. 3.103.396.000 dengan persentase sebesar 99,63%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.367.251.000, telah terealisasi sebesar Rp. 2.355.244.000, atau sebesar 99,49%. IKK ini didukung oleh 1 output, yaitu lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.444.443.000, telah terealisasi sebesar Rp. 24.406.250.093 dengan persentase sebesar 99,84%. IKK ini didukung oleh satu output yaitu angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.665.580.000, telah terealisasi sebesar Rp. 2.660.673.400, atau sebesar 99,82%. IKK ini didukung oleh 2 output:
 - a. Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.163.300.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.161.699.300 dengan

- persentase sebesar 99,93%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
- b. Layanan internal (overhead), dari pagu anggaran sebesar Rp. 502.280.000, telah terealisasi sebesar Rp. 498.974.100 dengan persentasi sebesar 99,34%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 750.203.000, telah terealisasi sebesar Rp. 748.088.000 dengan persentasi sebesar 99,72%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan berstandar nasional. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap diakreditasi tidak dianggarkan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2017 karena menjadi tupoksi UPT BP-PAUD dan Dikmas melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas (termasuk anggarannya).
 12. Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi, dari pagu anggaran sebesar Rp. 743.450.000 telah terealisasi sebesar Rp. 739.032.050 dengan persentasi sebesar 99,41%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.122.975.000 telah terealisasi sebesar Rp. 4.121.293.954 dengan persentasi sebesar 99,96%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dari pagu anggaran sebesar Rp 3.040.231.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.010.382.500 dengan persentasi sebesar 99,02%. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Layanan Internal (Overhead). Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.

15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.971.685.000 telah terealisasi sebesar Rp. 8.460.334.665 dengan persentasi sebesar 84,84%. IKK ini didukung oleh 2 output yaitu:
 - a. Layanan internal (overhead), dari pagu anggaran sebesar Rp. 936.592.000 telah terealisasi sebesar Rp. 921.309.800 dengan persentasi sebesar 98,37%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
 - b. Layanan perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.035.093.000 telah terealisasi sebesar Rp. 7.539.024.865 dengan persentase sebesar 83,44%. Output ini tidak terserap 100% disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
16. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 540.150.000 telah terealisasi sebesar Rp. 535.598.000 dengan persentase sebesar 99,16%. Tidak tercapainya target 100% pada output ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
17. Kendaraan Operasional Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 220.334.000 tidak ada realisasi. IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Layanan internal (overhead). Tidak terealisasinya output ini disebabkan oleh adanya blokir anggaran pembelian kendaraan bermotor.

BAB

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, baik berdasarkan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dapat disimpulkan kinerja terhadap rencana kegiatan tahun 2017 sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja pendidikan kecakapan kerja belum mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melampaui target output berdasarkan RKA-KL;
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melampaui target output berdasarkan RKA-KL;
3. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan jauh melampaui mencapai target renstra dan melebihi target output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan yang ditetapkan;
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan telah mencapai target renstra dan melebihi target output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan;
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan kurang mencapai target renstra maupun target output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan;
6. Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional jauh melampaui target renstra dan melebihi target output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan yang ditetapkan;
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah mencapai target output berdasarkan RKA-KL;
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji Kompetensi kurang mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melampaui target output berdasarkan RKA-KL;
9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis belum mencapai target renstra yang ditetapkan maupun target output berdasarkan RKA-KL;
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi telah melampaui target renstra dan target output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan;
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi tidak dilaksanakan karena tidak lagi menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
12. Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi telah melampaui target renstra maupun output berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan;

13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tidak mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah mencapai target output berdasarkan RKA-KL;
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana telah mencapai target renstra yang ditetapkan;
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN telah melampaui target renstra yang ditetapkan;
16. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran telah melampaui target renstra yang ditetapkan;
17. Kendaraan Operasional Perkantoran tidak dilakukan karena tidak ada target yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Beberapa saran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis di atas antara lain:

1. Mengevaluasi kembali penyaluran dana bantuan pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain mekanisme bantuan bisa dilakukan dengan sistem *online*, sistem *top down* yaitu dengan penunjukkan langsung dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendapatkan bantuan dengan menggunakan kriteria tertentu seperti lembaga yang terakreditasi/berkinerja A dan B serta yang tahun sebelumnya baik dan sukses dalam melaksanakan program tersebut sehingga diharapkan penyaluran bantuan pemerintah berjalan lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
2. Mendorong kesiapan organisasi profesi untuk menginisiasi terbentuknya LSK dan mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk pembentukan TUK, terutama untuk bidang keterampilan yang mendukung MEA;
3. Terus mempercepat tersusunnya standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang-bidang yang mendukung Nawacita Presiden, potensi daerah dan MEA;
4. Merancang dan menetapkan rencana kinerja 2014-2019 dengan memperhatikan aspek-aspek kesiapan anggaran, kemampuan lembaga, dan indikator dalam pengukuran pencapaian kinerja dengan mencermati hasil evaluasi terhadap program dan anggaran tahun 2017 ini;

5. Mencermati evaluasi pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2017 yang tertuang dalam LAKIP untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja tahun 2018. Kegiatan yang tidak mendukung output secara langsung dalam rangka pencapaian renstra untuk ditelaah kembali dan dihapuskan atau dimodifikasi jika memang memberikan kontribusi yang kecil.
6. Mencermati evaluasi program dan anggaran tahun 2017 terhadap pencapaian output dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam LAKIP untuk disesuaikan dengan dinamika organisasi dan arah perkembangan kebijakan kursus dan pelatihan sebagai pijakan dan bahan masukan revisi renstra Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berikut target dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan



Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Mempertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;
7. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan;
9. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; dan
10. Melaksanakan administrasi Direktorat

Target Capaian

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp. 000)
Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	90.000 Orang	95,882,125
	2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	50.000 Orang	119,771,200
	3	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	20 Kab/ kota	8,047,475
	4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	37 Naskah	5,247,435
	5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan	900 Lembaga	4,409,635
	6	Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	5 Naskah	3,159,200
	7	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	350 Lembaga	3,739,700
	8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi	140.000 Orang	33,842,850
	9	Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	1.022 Lembaga	5,807,772
	10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	5.194 Lembaga	1,517,484
	11	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	3.000 Lembaga	0
	12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	250 Orang	1,041,220
	13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	30.000 Orang	4,665,000
	14	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2 Dokumen	3,590,325

Keterangan: Untuk target IKK[11] anggaran dan pelaksanaannya adalah UPT BP-PAUD dan DIKMAS melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan DIKMAS dalam rangka persiapan akreditasi

Total Anggaran Program Kursus dan Pelatihan Tahun 2017 Rp. 302.414.098.000

**Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan**



(dalam juta)

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
1,072,698	14,571,100	15,408,019	45,332,878	38,150,224	45,761,750	32,907,229	27,788,022	32,338,863	27,386,611	14,300,368	7,396,336
0.35%	5.17%	10.27%	25.26%	37.87%	53.01%	63.89%	73.08%	83.77%	92.83%	97.55%	100.00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar

Jakarta, Januari 2017
Direktur Pembinaan Kursus
dan Pelatihan

Yusuf Muhyiddin

2. Perjanjian Kinerja Kasubdit Program dan Evaluasi



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kasubdit Program dan Evaluasi
Dengan
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan**

TUGAS

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubdit Program dan Evaluasi, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kursus dan pelatihan
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi di bidang pembinaan kursus dan pelatihan
- c. Menyusun program, kegiatan, dan anggaran direktorat
- d. Menyusun bahan dan melakukan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan
- e. Memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran direktorat serta pendanaan kursus dan pelatihan
- f. Menyusun laporan direktorat.

Target Capaian

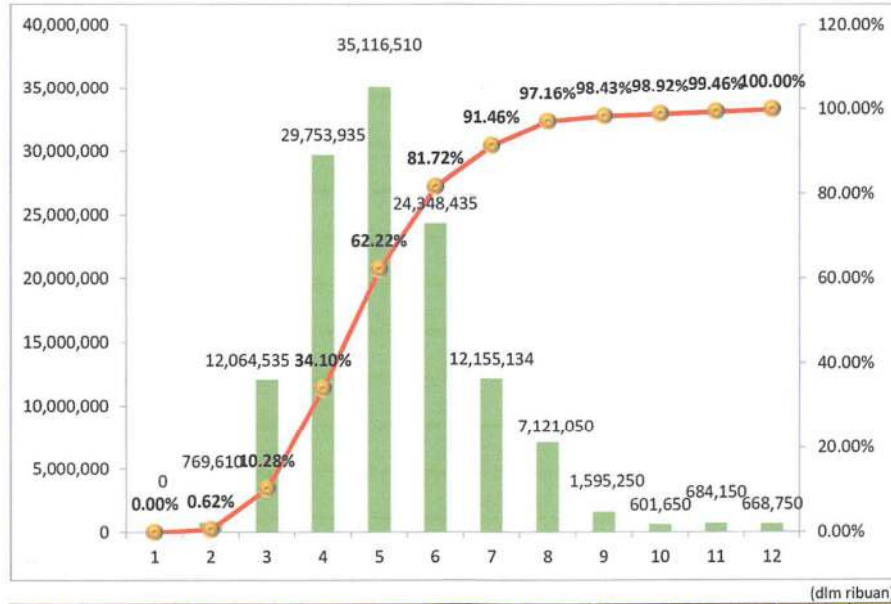
Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp. 000)
Fasilitasi Kursus dan Pelatihan, Kompetensi Penyelenggara/ Pendidik Kursus dan Pelatihan, Regulasi/ Kebijakan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Berwawasan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha	
	a.	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha	40.000 Orang 119,771,200
	2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	
	a.	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional 1) Validasi lembaga kursus dan pelatihan	2.007 Lembaga 1,517,484
	3	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	
	a.	Layanan Internal (overhead) 1) Penyusunan rencana program dan anggaran 2) Pengelolaan data dan informasi 3) Penyusunan laporan dan evaluasi	2 Dokumen 1,002,275 1,874,500 713,550

Total Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2017 Rp. 124,879,009,000,-

**Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan**



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
0.00%	0.62%	10.28%	34.10%	62.22%	81.72%	91.46%	97.16%	98.43%	98.92%	99.46%	100.00%
0	769,610	12,064,535	29,753,935	35,116,510	24,348,435	12,155,134	7,121,050	1,595,250	601,650	684,150	668,750

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pembinaan Kursus
dan Pelatihan

Yusuf Muhyiddin

Jakarta, Februari 2017
Kasubdit
Program dan Evaluasi

Maryana

3. Perjanjian Kinerja Kasubdit Sarana dan Prasarana



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kasubdit Sarana dan Prasarana
Dengan
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan**

TUGAS

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubdit Sarana dan Prasarana, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan
2. Menyusun bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana kursus dan pelatihan
3. Menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan
4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kursus dan pelatihan
5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Target Capaian

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp. 000)	
Fasilitasi Kursus dan Pelatihan, Kompetensi Penyelenggara/ Pendidik Kursus dan Pelatihan, Regulasi/ Kebijakan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Berwawasan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja			
	a.	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	50.000	Orang	95,882,125
	2	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan			
	a.	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional	108	lembaga	8,047,475
	1)	Pemberian bantuan Sarana lembaga kursus dan pelatihan rujukan di kab/kota			
	3	Jumlah standar program kursus dan pelatihan			
	a.	Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan			
	1)	Penyusunan/review standar penilaian kursus dan pelatihan	5	Naskah	479,325
	2)	Penyusunan/review bahan ajar kursus dan pelatihan	48	Naskah	1,972,310
	4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan			
a.	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional				
1)	Layanan kerjasama kehumasan promosi dan publikasi	80	Lembaga	954,510	
Total Anggaran Subdit Sarana dan Prasarana Tahun 2017 Rp. 107,335,745,000,-					

**Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan**



(dim ribuan)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0.18%	0.40%	1.20%	11.35%	21.18%	36.96%	49.94%	64.61%	81.31%	98.96%	100.00%	100.00%
194,675	234,615	863,325	10,892,190	10,543,842	16,942,798	13,928,527	15,754,798	17,917,850	18,949,810	1,113,315	0

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pembinaan Kursus
dan Pelatihan

Yusuf Muhyiddin

Jakarta, Februari 2016
Kasubdit
Sarana dan Prasarana

I Gede Panca

4. Perjanjian Kinerja Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan



Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan
Dengan
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

TUGAS

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan
2. Menyusun bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan
3. Menyusun bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan
4. Menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola kursus dan pelatihan
5. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan
7. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan.

Target Capaian

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp. 000)
Fasilitasi Kursus dan Pelatihan, Kompetensi Penyelenggara/ Pendidik Kursus dan Pelatihan, Regulasi/ Kebijakan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Berwawasan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global	1	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan			
		a. Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional			
		1) Penguatan lembaga kursus dan pelatihan/mitra	142	Lembaga	6,870,225
	2	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI)			
	a. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja				
	1) Pelaksanaan magang bagi peserta didik pada DUDI	1.000	Orang	4,665,000	

Total Anggaran Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Tahun 2017 Rp. 11,535,225,000

**Rencana Penyerapan Anggaran Kelembagaan dan Kemitraan
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan**



(dlm ribuan)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0.00%	4.45%	8.44%	27.42%	32.39%	48.90%	74.48%	86.13%	90.03%	94.37%	98.70%	100%
0	513,475	460,250	2,188,925	574,075	1,903,600	2,951,150	1,343,750	450,000	500,000	500,000	150,000

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pembinaan Kursus
dan Pelatihan

Yusuf Muhyiddin

Jakarta, Februari 2017
Kasubdit
Kelembagaan dan Kemitraan

Rr. Lestari Kusumawardhani

Target Capaian

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp. 000)	
Fasilitasi Kursus dan Pelatihan, Kompetensi Penyelenggara/ Pendidik Kursus dan Pelatihan, Regulasi/ Kebijakan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang Berwawasan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja			
	a.	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	50.000	Orang	95,882,125
	2	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan			
	a.	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional 1) Pemberian bantuan Sarana lembaga kursus dan pelatihan rujukan di kab/kota	108	lembaga	8,047,475
	3	Jumlah standar program kursus dan pelatihan			
	a.	Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan 1) Penyusunan/review standar penilaian kursus dan pelatihan	5	Naskah	479,325
		2) Penyusunan/review bahan ajar kursus dan pelatihan	48	Naskah	1,972,310
	4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan			
	a.	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional 1) Layanan kerjasama kehumasan promosi dan publikasi	80	Lembaga	954,510

Total Anggaran Subdit Sarana dan Prasarana Tahun 2017 Rp. 107,335,745,000,-